

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KARAKTERISTIK
ASET DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN SUKARELA
(STUDI EMPIRIS PADA BANK YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2012)**



Oleh:

DIANA AQMARINA

201012086

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

INDONESIAN BANKING SCHOOL

JAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KARAKTERISTIK
ASET DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN SUKARELA**

**(STUDI EMPIRIS PADA BANK YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA 2012)**



Oleh:

DIANA AQMARINA

201012086

Diterima dan Disetujui untuk Diajukan dalam Ujian Komprehensif

Jakarta, 03 Februari 2014

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bani Saad', is positioned above the printed name.

(Bani Saad, SE.Ak.,M.Si)

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Diana Aqmarina
NIM : 201012086
Judul Skripsi : Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Aset dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012)

Tanggal Ujian Komprehensif : 25 Februari 2014

Penguji :
Ketua : Dr. Trinandari Prasetya Nugrahanti, SE.Ak.,M.Si.
Anggota : 1. Gunawan, SE., MM.
2. Bani Saad, SE.Ak.,M.Si

dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif :

Pada tanggal : 25 Februari 2014

Dengan hasil : LULUS

Tim Penguji,
Ketua,

Dr. Trinandari Prasetya Nugrahanti, SE.Ak.,M.Si.

Anggota I

Gunawan, SE., MM.

Anggota II,

Bani Saad, SE.Ak.,M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diana Aqmarina
NIM : 201012086
Judul Skripsi : Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Aset dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012)

Pembimbing Skripsi,


Bani Saad, SE.Ak.,M.Si.

Tanggal LULUS : 25 Februari 2014

Dengan hasil : LULUS

Mengetahui,

Ketua Panitia,

Ketua Jurusan



Dr. Trinandari Prasetya Nugrahanti, SE.Ak.,M.Si.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, hanya dengan ridhoNya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Aset dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012” dengan baik. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi STIE Indonesia Banking School.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan saran kepada penulis. Penulisan skripsi ini tak lepas dari dukungan yang paling berarti yaitu dari pihak keluarga penulis, Teruntuk Ayah dan ibu, kakak-kakak ku tersayang Fidriyanti, Hanaria, Arso, Wahid dan keponakan ku Adzkiya yang selalu memberikan keceriaan. Terima kasih telah memberikan seluruh kasih sayang, selalu memberikan semangat, selalu mengajarkan keikhlasan, memberikan dukungan baik moril, materi dan doa yang tak pernah putus kepada saya. Semoga dengan gelar ini dapat memberikan sedikit kebanggaan dan dapat membahagiakan kalian serta lebih berguna kedepannya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tiada hingganya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, SE,MA selaku Ketua STIE Indonesia Banking School.
2. Para jajaran pimpinan STIE IBS, Wakil Ketua I Bapak Taufik Hidayat, SE.Ak.,M.Banfin, Wakil Ketua II Ibu Dr. Trinandari Prasetya Nugrahanti,

SE.Ak.,M.Si yang juga selaku penguji skripsi penulis, dan Wakil ketua III Bapak Donant A, Iskandar SE., MBA, atas ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan di STIE Indonesia Banking School.

3. Novy Silvia Dewi, SE., MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Indonesia Banking School.
4. Bapak Bani Saad, SE.Ak.,M.Si selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, diskusi serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan memberikan nasehat serta pengarahan selama menjalankan perkuliahan di STIE Indonesia Banking School.
5. Bapak Gunawan, SE., MM, selaku penguji skripsi yang telah banyak memberikan saran, pengarahan dan pemahaman dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh staf pengajar dan dosen STIE IBS yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama proses perkuliahan di Indonesia Banking School.
7. Seluruh staf administrasi STIE IBS yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.
8. Dean Aditya Primananda, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis, siap siaga membantu, menemani dan mendukung setiap keputusan yang diambil oleh Penulis.
9. Teman-teman terbaik selama proses perkuliahan, Akuntansi 4, Senat Mahasiswa 2012/2013, UKM Tari IBS dan teman seperjuangan dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat Fatisya Ilani, Vika Setianti, Atika Ayu, Putry Nurjannah, Dini Dwiarti, Adinda Amanah, Neysa Renilda, Dina Hidayat, Mayzura Ghassani, Gina

Shabrina, Farah Safira, Pambayun Siam, Vanya Viranda, Dessy Maharani dan Kita-Kita 38 2010. Terimakasih atas dukungan, semangat dan selalu memberikan keceriaan kepada penulis didalam kondisi apapun.

11. Anissa Dwi Frestasia, Ranti Virginia, Putri Tiara, Sulistio, Monica, Risang, Dini Aristiana yang telah meluangkan waktunya untuk mengajarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan lainnya, terimakasih atas segala dukungan, masukan, serta bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun tidak lepas dari rasa terimakasih yang sebenar-benarnya.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, bagi para pembaca pada umumnya dan seluruh mahasiswa Indonesia Banking School pada khususnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis,

Diana Aqmarina

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTARiv

ABSTRACTvii

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI viii

DAFTAR ISIix

DAFTAR TABELxii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Permasalahan Penelitian 9

1.2.1. Perumusan Masalah..... 9

1.2.2. Pembatasan Masalah 10

1.3. Tujuan Penelitian 10

1.4. Manfaat Penelitian 11

1.5. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI..... 14

2.1 Tinjauan Pustaka 14

2.1.1 Bank..... 14

2.1.2. Laporan Keuangan 19

2.1.3. Definisi dan Ruang Lingkup Pengungkapan..... 25

2.1.4. Pengungkapan Wajib (*Mandated Disclosed*) 27

2.1.5. Pengungkapan Sukarela (<i>Voluntary Disclosure</i>)	54
2.2 Penelitian Terdahulu	58
2.3. Rerangka Pemikiran.....	61
2.4. Pengembangan Hipotesis	62
2.4.1. Struktur Kepemilikan	62
2.4.2. Karakteristik Aset Perusahaan (<i>Assets in Place</i>).....	68
2.4.3. Dana Pihak Ketiga.....	70
2.4.4. Variabel Pengendali (<i>Control Variable</i>)	71
2.4.5. Kepemilikan <i>Blockholder</i> , Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Karakteristik Aset, Dana Pihak Ketiga, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i>	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	75
3.1. Objek Penelitian.....	75
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	75
3.2.1. Data yang dihimpun	75
3.2.2. Metode Pengambilan Sampel.....	76
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	77
3.3. Operasional Variabel.....	77
3.3.1. Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	77
3.3.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	82
3.3.3. Variabel Pengendali (<i>Control Variable</i>)	85
3.4. Metode Analisis Data.....	86
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	86
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	86
3.4.3. Analisis Regresi Berganda	88
3.4.4. Uji Hipotesis.....	90
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	91
4. 1. Gambaran Umum Objek Penelitian	91
4.2. Analisis Hasil Penelitian	92
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	92
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	96
4.3. Analisis Regresi Berganda	100

4.4. Pengujian Hipotesis.....	102
4.4.1. Koefisien Determinasi.....	102
4.4.2. Uji t.....	103
4.4.3. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F).....	110
4.5. Implikasi Manajerial	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	114
5.1. Kesimpulan	114
5.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
RIWAYAT HIDUP.....	126



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rangkuman Penelitian Sebelumnya.....	58
TABEL 4.1. Hasil Pemilihan Sampel.....	91
TABEL 4.2. Hasil Statistik Deskriptif.....	92
TABEL 4.3. Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kormogorov-Smirnov</i>	97
TABEL 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas.....	98
TABEL 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	99
TABEL 4.6. Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	102
TABEL 4.7. Hasil Uji t.....	103
TABEL 4.8. Hasil uji F.....	110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Jenis-jenis Informasi Keuangan.....	24
GAMBAR 2.2 Rerangka Pemikiran.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Daftar *Checklist* Voluntary Disclosure

LAMPIRAN 2. Daftar Nama Perusahaan Perbankan

LAMPIRAN 3. Data Olahan Input SPSS



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Aqmarina

NIM : 201012086

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan STIE IBS.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis

METERAI
TEMPEL
PALU, KEMENTERIAN KEHUKUMATAN
TGL. 20
EB829ACF534525585
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP



(Diana Aqmarina)

ABSTRACT

The primary aim of this research is to identify factors that affect on voluntary disclosure of the annual report. The examined factors of this research are blockholder ownership, state ownership, institutional ownership, foreign ownership, assets in place and third party funds. The samples of this research are banking on listed on Indonesian Stock Exchange 2012.

The object of this research was annual report of banking in 2012 and the data analysis was treated as cross section. The statistic method used to test on the research hypothesis is multiple regression. The first hypothesis was formulated to consist examined that affect of blockholder ownership on voluntary disclosure. The second hypothesis was formulated to consist examined that affect of state ownership on voluntary disclosure. The third hypothesis was formulated to consist examined that affect of institutional ownership on voluntary disclosure. The fourth hypothesis was formulated to consist examined that affect of foreign ownership. The fifth hypothesis was formulated to consist examined that affect of assets in place on voluntary disclosure. The sixth hypothesis was formulated to consist examined that affect of third party funds on voluntary disclosure.

The result of this research shows that third party funds was positive significantly affect voluntary disclosure of annual report and the other variable was not significantly relation. The other result of this research shows that are blockholder ownership, state ownership, institutional ownership, foreign ownership, assets in place and third party funds were simultaneously had positive significant affect of voluntary disclosure.

Keywords : Voluntary disclosure, blockholder ownership, state ownership, institutional ownership, foreign ownership, assets in place, third party funds.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengungkapan merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan informasi penting terkait suatu perusahaan. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya.

Meninjau permasalahan kasus pengungkapan yang terjadi saat ini alangkah bijaksananya apabila kita melihat kembali beberapa kasus pengungkapan yang terjadi pada beberapa tahun kebelakang baik di dalam maupun luar negeri. Kasus yang terjadi terkait akan pentingnya pengungkapan informasi suatu entitas dapat dilihat dari kasus luar negeri yaitu Lehman Brothers Holdings, Inc. Lehman Brothers, Inc adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Bank Investasi, perdagangan saham dan obligasi, riset pasar, manajemen investasi, ekuitas pribadi dan layanan perbankan personal. Lehman Brothers, Inc yang pada akhir Agustus 2008 mengalami rugi USD 3,9 miliar menyusul kerugian USD 2,8 miliar pada triwulan II. Akibat terjadinya krisis subprime mortgage di AS, mereka terpaksa menghapusbukukan kredit macet USD 13,8 miliar kemudian menghimpun dana USD 10 miliar melalui penerbitan saham. Pada 15 September 2008, Lehman Brothers meminta perlindungan atas kebangkrutan. Kewajiban utang terhadap bank dinyatakan sejumlah \$613 miliar, \$155 miliar utang obligasi, sementara aset yang dimiliki hanya sejumlah \$639 miliar. Kasus Lehman Brothers menunjukkan bahwa pengungkapan informasi yang tidak sempurna menyebabkan terjadinya hal-hal negatif bagi perusahaan, bahkan hingga kebangkrutan.

Selain dari aspek Lehman Brothers, Auditor Ernst Young sebagai auditor keuangan Lehman Brothers juga dinilai lalai, dan melaporkan hasil audit palsu soal keuangan. Selain permintaan tambahan kolateral, penumpukan aset Lehman Brothers juga dibuat terpusat pada kredit kepemilikan kredit rumah bermasalah. Sehingga ada kasus penyesatan informasi yang material dalam akuntansi Lehman. Menurut laporan Auditor Ernst Young, tersirat bahwa Lehman menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar AS di pembukuannya. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungan dari utangnya.

Di Indonesia sendiri, kasus yang serupa terjadi pada tahun 2008 pada Perusahaan Jasa Keuangan Bank Century, Bank Century telah memberikan informasi yang tidak benar guna memberikan citra baik terhadap stabilitas bank dan semakin dikuatkan dengan adanya rekayasa akuntansi yang dilakukan Bank Century guna mendapatkan bantuan dana dari Bank Indonesia. Dari kedua kasus yang terjadi menunjukkan bahwa Lehman Brothers Holdings, Inc dan Bank Century telah mengabaikan prinsip-prinsip GCG yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan). Dalam kasus ini, tampak sekali adanya ketidakterbukaan informasi.

Prinsip *Corporate Governance* tentang *disclosure & transparency* menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Menurut OECD dalam Oktoviana (2009) , terdapat empat hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu, pertama, pengungkapan mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada informasi yang material tentang hasil keuangan dan operasi

perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara, anggota Dewan Komisaris (*board of directors*) & eksekutif kunci (*key executive*) serta remunerasinya, faktor-faktor risiko material yang dapat diperkirakan, isu material yang berkaitan dengan pekerjaan dan stakeholders yang lain, serta struktur dan kebijakan tata kelola (*Governance structure & policy*). Kedua, informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan finansial dan non finansial, dan audit yang bermutu tinggi. Ketiga, audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen (auditor eksternal) agar memberikan keyakinan yang memadai dan obyektif atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh manajemen. Keempat, saluran penyebaran informasi (*distribution information*) harus memberikan akses yang wajar (*fair*), tepat waktu (*timely*) dengan biaya yang efisien (*cost efficient*) terhadap informasi yang relevan untuk para pemakai (*user*).

Batasan Pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan tidak hanya sebatas apa yang tercantum di dalam OECD principles. Bagi perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak eksternal melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan di Indonesia, lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Sebagai bentuk upaya untuk melindungi para pemilik modal dari adanya informasi asimetri, Bapepam telah mengeluarkan peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yaitu Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Penerbitan peraturan ini mencabut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan

Publik dan Keputusan Ketua Bapepam. Penyempurnaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban penyampaian bentuk, dan isi laporan tahunan.

Seiring dengan adanya Penyempurnaan Peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan sejalan dengan perkembangan Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam rangka konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standard* yang mewajibkan Perusahaan Publik atau Emiten mengadopsi IFRS sejak tahun 2012, maka Bapepam dan LK menyempurnakan satu peraturan lain yaitu Peraturan Nomor VIII.G.7 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Penerbitan peraturan ini menggantikan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010. Peraturan ini berisi mengenai Ketentuan Umum Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan keuangan. Sementara itu bagi perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan, selain mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepem juga harus mengikuti Peraturan Bank Indonesia selaku pengawas tertinggi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank, Penerbitan peraturan ini menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tentang transparansi Kondisi Keuangan Bank. Peraturan ini berisi mengenai Ketentuan Umum, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi

Triwulan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Publikasi Lain dan Saksi pada Bank.

Lang dan Lundholm (1996) menyatakan bahwa meskipun seluruh perusahaan publik harus memenuhi persyaratan pengungkapan minimum sebagaimana yang disyaratkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal di negara yang bersangkutan, setiap perusahaan memiliki kebijakan yang beraneka ragam terkait banyaknya informasi yang mereka ungkapkan di pasar modal. Bahkan untuk pengungkapan yang sifatnya diwajibkan, seperti yang ada di laporan keuangan perusahaan, perusahaan memiliki keleluasaan terkait tingkat informasi pengungkapan dan detil informasi yang disajikan. Jadi, tingkat pengungkapan antara satu Perusahaan dengan Perusahaan lain berbeda-beda.

Menurut Darrougth (1993), Jenis pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan ketua BAPEPAM-LK dan keputusan Bank Indonesia), Salah satu elemen pengungkapan yang wajib disajikan oleh perusahaan adalah yang lebih mengarah ke aspek keuangan yaitu laporan keuangan.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan melebihi pengungkapan wajib yang diwajibkan. Oktoviana (2009) menyatakan bahwa Pengungkapan sukarela merupakan keputusan manajemen yang cukup sensitif yang dapat mengungkap informasi internal kepada para pemegang saham dan juga para pesaing. Almilia (2008) menyatakan ada beberapa teori dapat digunakan

untuk menjelaskan pengungkapan sukarela yaitu teori keagenan, *signaling theory* dan analisa biaya – manfaat. Teori keagenan memberikan pemahaman dan analisa insentif pelaporan keuangan. Teori keagenan menyatakan bahwa dengan adanya asimetri informasi, manajer akan memilih seperangkat kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan manajer sendiri. *Signalling theory* dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan dan Analisa Biaya manfaat dapat digunakan Manajemen untuk membuat sumber daya yang akan dipakai apabila manfaat yang didapat melebihi biaya yang diperkirakan. Gray dan Roberts (1989) menunjukkan terdapat 5 manfaat dan 2 biaya dari pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan multinasional di Inggris. Lima manfaat pengungkapan sukarela meliputi: (1) memperbaiki reputasi perusahaan, (2) menyajikan informasi yang dapat menghasilkan keputusan investasi yang lebih baik bagi investor, (3) memperbaiki akuntabilitas, (4) memperbaiki prediksi risiko yang dilakukan oleh investor, dan (5) menyajikan kewajaran harga saham yang lebih baik. Sedangkan biaya dari Pengungkapan sukarela meliputi: (1) biaya *competitive disadvantages*, dan (2) biaya untuk mengumpulkan dan memproses data.

Pengungkapan sukarela menarik untuk diteliti karena pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang satu berbeda dengan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan lain dan pengungkapan ini dapat mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara perusahaan dan pasar yang memfasilitasi perdagangan (Godfrey, 2010). Faktor-faktor yang menentukan tingkat pengungkapan sukarela dapat dilihat dari banyak faktor, diantaranya dari Struktur Kepemilikan yang dimiliki. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemegang saham luar akan meningkatkan perilaku pengawasan kepada manager untuk mengurangi masalah

keagenan. Pemantauan oleh pemegang saham luar dapat meningkatkan biaya pengawasan (*monitoring cost*). Namun, *monitoring cost* dapat dikurangi jika manager dapat memberikan pengungkapan sukarela. Artinya, pengungkapan sukarela adalah cara untuk dapat meminimalkan biaya pengawasan (*monitoring cost*)

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk pengaruh struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Namun setiap penelitian tersebut menggunakan indikator Struktur Kepemilikan yang berbeda-beda sehingga diperoleh hasil yang berbeda di setiap penelitian. Huafang dan Juanguo (2007) menggunakan kepemilikan *blockholder*, kepemilikan asing, kepemilikan managerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Cina. Mereka menemukan bahwa kepemilikan *blockholder*, kepemilikan asing memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela; kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dan tidak signifikan; kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan *legal-person* memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) merupakan pengalokasian jumlah aset tetap dari total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Hossain dan Mitra (2004) menemukan bahwa karakteristik aset secara sistematis mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela di Amerika Serikat. Butler *et all* (2002) menyatakan bahwa perusahaan dengan persentase aset tetap yang lebih tinggi mungkin cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah dari *agency cost*, karena menunjukkan lebih sedikit permintaan untuk pemantauan dari kreditur yang akan mengakibatkan pengungkapan yang lebih rendah. Hal tersebut didukung oleh penelitian Nurfadillah (2012) menyatakan bahwa

karakteristik aset memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agency problem yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.

Di industri jasa keuangan, khususnya bank. Ada faktor lain yang juga cukup penting untuk diungkapkan, yaitu dana pihak ketiga. Bank merupakan lembaga yang memiliki fungsi intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat, salah satunya dalam bentuk kredit. Pengelolaan dana pihak ketiga ini memiliki risiko dan membutuhkan teknik pengelolaan sendiri. Oleh karena itu sangatlah penting bagi Bank untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga nasabah dapat merasa yakin bahwa dana yang mereka tempatkan dikelola secara aman dan efektif.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Huafang dan Juanguo (2007), Nurfadillah (2012), dan Hariandy (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian, penelitian ini mengambil industri yang bergerak dalam sektor perbankan dikarenakan adanya regulasi yang berbeda dengan industri lainnya yaitu BAPEPAM-LK dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan adanya penyempurnaan kedua regulasi tersebut mengenai Pengungkapan, maka Peneliti tertarik untuk mengambil penelitian di Indonesia mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada sektor Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh Struktur kepemilikan, Karakteristik Aset dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pengungkapan Sukarela (studi empiris pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012)”**.

1.2. Permasalahan Penelitian

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian ini dalam beberapa hal berikut :

1. Apakah kepemilikan *blockholder* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?
5. Apakah karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?
6. Apakah jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?
7. Apakah kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset perusahaan, jumlah dana pihak ketiga, ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada bank yang terdaftar di BEI tahun 2012?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Penelitian ini memfokuskan pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012.
2. Penelitian ini menggunakan data Laporan Tahunan tahun 2012
3. Penelitian ini menggunakan data Laporan keuangan yang terdapat didalam Laporan Tahunan tahun 2012
4. Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yaitu kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintahan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset, dana pihak ketiga dan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *Leverage*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap tingkat pengungkapan sukarela
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan sukarela
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan asing terhadap tingkat pengungkapan sukarela
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik aset (*asset in place*) terhadap tingkat pengungkapan sukarela

6. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah dana pihak ketiga terhadap tingkat pengungkapan sukarela
7. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset perusahaan, jumlah dana pihak ketiga, ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan sukarela

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi investor dan calon investor

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai masukan untuk pengambilan keputusan, baik untuk investasi maupun divestasi atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Serta membantu investor dan pelaku keuangan lainnya untuk lebih memahami bagaimana tingkat pengungkapan sukarela di Indonesia, khususnya pada perbankan.

2. Bagi Regulator

Memberikan gambaran bagi regulator mengenai kondisi pengungkapan sukarela pada bank-bank di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi agar dapat menjadi dasar penetapan peraturan dan kebijakan yang sesuai bagi bank-bank yang ada di Indonesia.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Mengevaluasi secara lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang penting dalam pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia serta memberikan acuan bagi

penelitian selanjutnya.

4. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca, baik masyarakat akademik maupun masyarakat umum mengenai komposisi kepemilikan secara umum bank-bank yang ada di Indonesia dan mengembangkan pengetahuan mengenai tingkat pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas latar belakang Penelitian, Permasalahan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika pembahasan.

2) BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, bab ini menjelaskan kerangka pemikiran penelitian serta pembentukan hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian. Kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan variabel independen dan variabel pengendali dengan variabel dependen dan pengembangan hipotesis.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, sifat dan model penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

4) BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1. Definisi Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (Revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2. Karakteristik Bank

Menurut Taswan (2010), Ada beberapa karakteristik bank antara lain:

1. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan mereka yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar falsafah kepercayaan.
2. Bank juga merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan pemeliharaan kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian *profit* dan likuiditas yang cukup.

3. Pengelola bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. Hal tersebut perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *fee based income* (pendapatan non bunga). Untuk itu strategi penghimpunan dan penempatan dana bank perlu dilakukan secara hati-hati agar likuiditas terpelihara dan profitabilitaa tercapai secara wajar.
4. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan.
5. Secara Operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya relatif rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan perbandingan antara aktiva dengan modal (*financial leverage*) sangat besar.

2.1.1.3. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya

Menurut Latumaerissa (2012), ada beberapa jenis bank berdasarkan kepemilikannya, antara lain:

1. Bank Milik Negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah UU tersendiri.
2. Bank Milik Swasta, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/ atau badan-badan hukum di Indonesia.

3. Bank Swasta Asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan bank nasional yang ada di Indonesia. Bank Asing ini hanya diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia.
4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
5. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

2.1.1.4. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional

Menurut Taswan (2010), kegiatan usaha Bank Umum Konvensional antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipetrsamakan dengan itu.
2. Memberi Kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya, antara lain:
 5. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

6. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
7. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
8. Sertifikat Bank Indonesia.
9. Obligasi.
10. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
11. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
12. Memindahbukukan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
13. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
14. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
16. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
17. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa.
18. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
19. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
20. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Melakukan kegiatan dalam Valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
22. Melakukan kegiatan penyertaan Modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
23. Melakukan kegiatan penyertaan modal serta untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
24. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.1.5. Laporan Keuangan Bank

Kewajiban Penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan Publikasi Laporan Bank dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar serta Peraturan Nomor VIII.G. 7 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 Tentang penyajian dan pengungkapan Laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Menurut Taswan (2010) Laporan Keuangan Bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan

transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Laporan keuangan disusun sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu laporan keuangan bank harus memenuhi syarat tertentu, dan karakteristik kualitatif

2.1.2. Laporan Keuangan

2.1.2.1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam PSAK Revisi 2012 bagian Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 7, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Pengertian lain mengenai Laporan keuangan menurut Kieso (2011), dijelaskan bahwa:

“Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. These statement provide a company’s history quantified in money terms”

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan catatan atas laporan keuangan yang nilainya dinyatakan dalam ukuran satuan uang.

2.1.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam PSAK Nomor 1, Revisi 2012. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan lain menurut Kieso (2011), secara umum tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi pelaporan keuangan kepada berbagai pengguna. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai pelaporan keuangan kepada berbagai pengguna yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

- a) Aset;
- b) Liabilitas;
- c) Ekuitas;
- d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan

f) Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas

2.1.2.3. Komponen Laporan Keuangan

Sebagaimana tercantum dalam PSAK Nomor 1 Revisi 2012, Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a) Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- f) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Menurut Kieso (2011), laporan keuangan terdiri dari komponen berikut ini:

- a) Laporan posisi keuangan
- b) Laporan laba rugi atau laporan komperhensif income
- c) Laporan arus kas

- d) Laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komponen laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dan Kieso (2012) adalah sama, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau laporan komperhensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan selama periode.

2.1.2.4. Pengguna Laporan Keuangan

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan laporan keuangan, sebagian besar kalangan pengguna menggunakan laporan keuangan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam PSAK Revisi 2012 dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pengguna laporan keuangan meliputi:

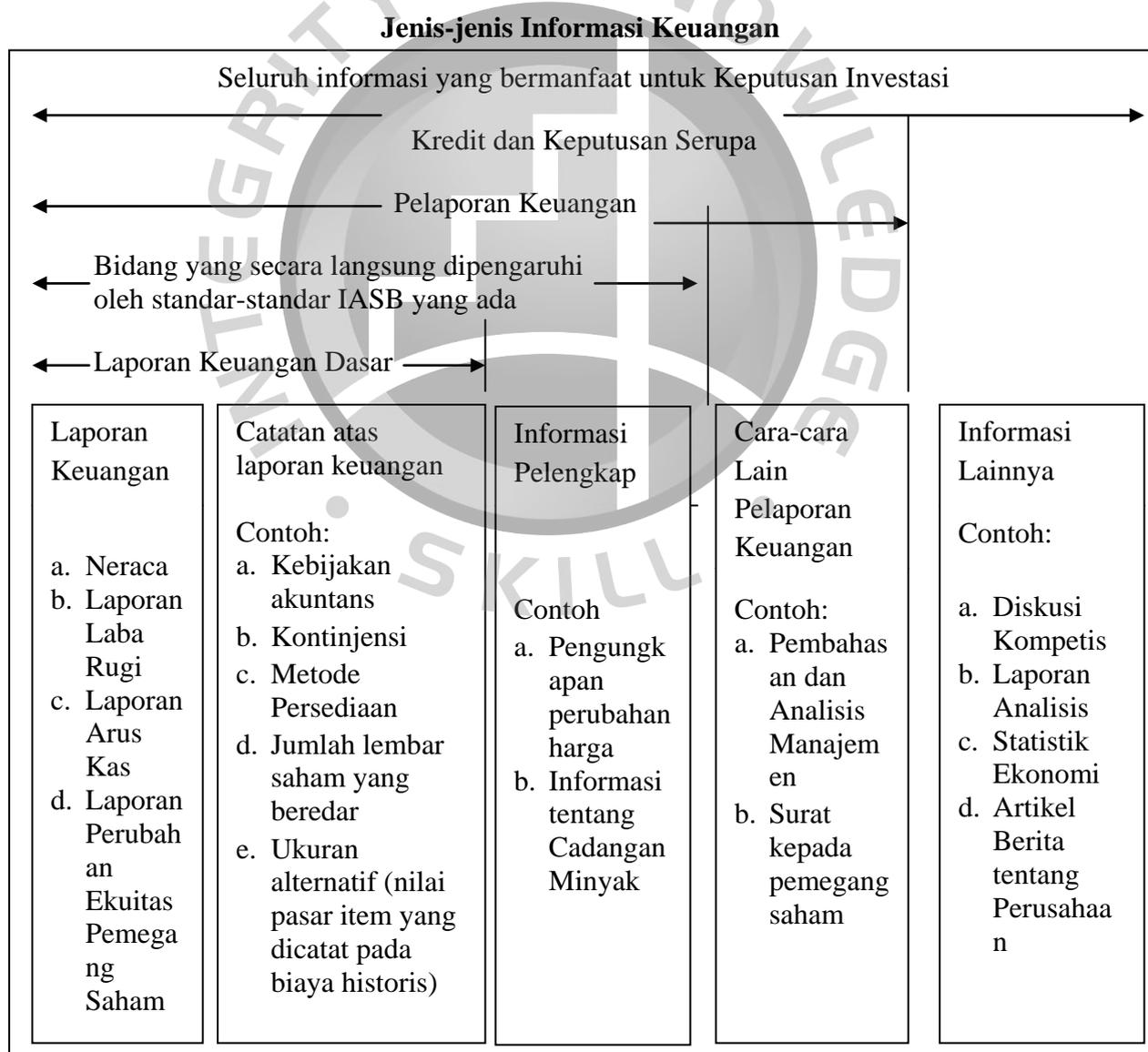
- a) Investor. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
- b) Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja dan kesempatan kerja.

- c) Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas.
- e) Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada kelangsungan hidup entitas.
- f) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- g) Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.2.5. Perbedaan Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

Menurut Kieso (2011), Laporan keuangan (*financial statement*) berbeda dengan pelaporan keuangan (*financial reporting*). Dalam pelaporan keuangan terdapat segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan sedangkan laporan keuangan (*financial statement*) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan (*financial reporting*).

Gambar 2.1



Sumber : Kieso (2011)

2.1.2.6. Laporan Tahunan Bank

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Penerbitan peraturan ini mencabut Keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Penyempurnaan peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan sesuai dengan penyempurnaan Ketentuan Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

2.1.3. Definisi dan Ruang Lingkup Pengungkapan

Definisi pengungkapan penuh (*full disclosure*) menurut Kieso (2011), dijelaskan bahwa:

“The full disclosure principle calls for financial reporting of any financial facts significant enough to influence the judgement of an informed reader. in some situations, the benefits of disclosure may be apparent but the costs uncertain. in other instance, the costs may be certain but the benefits of disclosure not as apparent.”

Menurut Evans (2003) dalam Suwardjono (2005), Definisi dari pengungkapan adalah sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statement themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements”

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan, antara lain :

a) Tingkat memadai (*adequate disclosure*),

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.

b) Tingkat wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*)

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi.

c) Tingkat penuh (*full disclosure*)

Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan

Darrougth (1993) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

a) Pengungkapan wajib (*Mandated Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang berwenang di negara yang bersangkutan. Jika perusahaan tidak bersedia untuk

mengungkapkan informasi secara sukarela, perusahaan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

b) Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2.1.4. Pengungkapan Wajib (*Mandated Disclosures*)

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Informasi tersebut berupa laporan tahunan secara berkala dan informasi lainnya yang diungkapkan kepada publik dan pengawas pasar modal.. Salah satu elemen pengungkapan yang wajib disajikan oleh perusahaan adalah yang lebih mengarah ke aspek keuangan yaitu Laporan Keuangan paragraf 12 dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) “Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Ketentuan mengenai pengungkapan wajib Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan publik yang diatur dalam Peraturan Nomor X. K. 6 lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor: Kep- 431/ BL/ 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Seperti dibawah ini:

1. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan

- a. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.
- c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*). Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- d. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK.
- e. Laman (*website*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diakses setiap saat.
- f. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan.
- g. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.

- h. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan.
- i. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.
- j. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
- 1) batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;
 - 2) penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain; dan
 - 3) laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

- 4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lama pada satu hari kerja berikutnya.
- 5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf j angka 1) dan angka 2).

2. Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan

a. Ketentuan Umum

- 1) Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.
- 2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.

- 3) Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas.
- 4) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.

b. Ikhtisar Data Keuangan Penting

- 1) Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, yang memuat paling kurang:
 - a) pendapatan;
 - b) laba bruto;
 - c) laba (rugi);
 - d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total laba (rugi) komprehensif;
 - e) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - f) laba (rugi) per saham;
 - g) jumlah aset;
 - h) jumlah liabilitas;
 - i) jumlah ekuitas;
 - j) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
 - k) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - l) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;

- m) rasio lancar;
 - n) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - o) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
 - p) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.
- 2) Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling kurang meliputi:
- a) jumlah saham yang beredar;
 - b) kapitalisasi pasar;
 - c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
 - d) volume perdagangan.
- 3) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib ditambahkan penjelasan antara lain mengenai:
- a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
 - b) rasio *stock split*, *reverse stock*, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham;
 - c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
 - d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.
- 4) Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (*suspension*) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut.

- 5) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Laporan Dewan Komisaris

Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan;
- 2) Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi; dan
- 3) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).

d. Laporan Direksi

Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
- 2) gambaran tentang prospek usaha;
- 3) penerapan tata kelola perusahaan; dan
- 4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).

e. Profil Perusahaan

Profil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan laman (*website*) perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan;
- 2) riwayat singkat perusahaan;

- 3) kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan;
- 4) struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;
- 5) visi dan misi perusahaan;
- 6) profil Dewan Komisaris, meliputi nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS, riwayat pendidikan, penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);
- 7) profil Direksi, meliputi nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan; riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS; riwayat pendidikan; penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada);
- 8) dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya;

- 9) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan;
- 10) Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:
 - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
- 11) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram;
- 12) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat;

13) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);

14) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);

15) nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada);

16) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.

Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, *fee*, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan

17) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada).

f. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Laporan tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup:

1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:

a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;

b) pendapatan; dan

c) profitabilitas;

2) analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang

penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai:

- a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
 - b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; serta
 - e) arus kas;
- 3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
 - 4) tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
 - 5) struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut;
 - 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
 - 7) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;
 - 8) prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;

- 9) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 10) target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;
- 12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
- 13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:
 - a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan
 - b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut;
- 14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada), yang antara lain memuat tanggal, nilai, dan obyek transaksi; nama pihak yang bertransaksi; sifat hubungan

afiliasi (jika ada); penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan pemenuhan ketentuan terkait;

15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan

16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).

g. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;
- 2) Direksi, mencakup antara lain ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan; pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan

yang belum direalisasikan; dan pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);

- 3) Komite Audit, mencakup antara lain nama; riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan; riwayat pendidikan; periode jabatan anggota Komite Audit; pengungkapan independensi Komite Audit; pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit;
- 4) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain:
 - a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan anggota komite;
 - e) pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite;
 - f) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - g) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran
 - h) anggotakomite dalam rapat tersebut; dan uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;

- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
 - a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan sekretaris perusahaan;
 - e) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;
- 6) uraian mengenai unit audit internal meliputi:
 - a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - d) struktur dan kedudukan unit audit internal;
 - e) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) unit audit internal; dan
 - f) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;
- 7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (*internal control*) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
 - a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - b) reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen;
- 8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
 - a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;

- b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
 - c) revidu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;
- 9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi pokok perkara/gugatan; status penyelesaian perkara/gugatan; dan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
- 10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);
- 11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi pokok-pokok kode etik; pokok-pokok budaya perusahaan (*corporate culture*); bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan;
- 12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* (jika ada); dan
- 13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi cara penyampaian laporan pelanggaran, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan; dan hasil dari penanganan pengaduan.

h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:

a) lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;

b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;

c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan

d) tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).

i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit

Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1.

j. Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibubuhkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan, sesuai dengan Formulir Nomor X.K.6-1 Lampiran Peraturan ini.
- 3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.
- 4) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

3. Ketentuan Penutup

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Seiring dengan adanya Penyempurnaan Peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan sejalan dengan perkembangan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam rangka konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standart* yang mewajibkan Perusahaan Publik atau Emiten mengadopsi IFRS sejak tahun 2012, maka Bapepam dan LK menyempurnakan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor VII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut berisi ketentuan umum laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan Catatan atas laporan keuangan yang mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik didalam menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan yang diterbitkan.

Sementara itu bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, selain mengikuti peraturan dari Bapepam juga harus mengikuti peraturan Bank Indonesia selaku pengawas tertinggi perbankan yang ada di Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi Laporan Bank, Penerbitan peraturan ini menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi kondisi keuangan Bank.

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan pengungkapan wajib yang diambil dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Seperti di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

a. Pasal 1(2)

Pengendalian adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang:

- 1) memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain;
- 2) memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain, tetapi: terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50 (lima puluh persen);
 - a) mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - b) mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau
 - c) mampu menguasai suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lainnya tersebut.

b. Pasal 1 (10)

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

c. Pasal 1 (11)

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

d. Pasal 1 (12)

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan dipublikasikan setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

e. Pasal 1 (13)

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

f. Pasal 1 (14)

Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

g. Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

- 1) Laporan Tahunan;
- 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- 3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
- 4) Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- 5) Laporan Publikasi Lain.

2. Laporan Tahunan

a. Pasal 3 (1)

Bank wajib menyusun Laporan Tahunan yang paling kurang mencakup:

- 1) informasi umum yang meliputi:
 - a) kepengurusan;
 - b) kepemilikan;
 - c) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk perkembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS);
 - d) strategi dan kebijakan manajemen termasuk strategi dan kebijakan manajemen UUS; dan
 - e) laporan manajemen termasuk laporan manajemen UUS;
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang meliputi:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d) Laporan Arus Kas; catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi;
- 3) opini dari Akuntan Publik;
- 4) jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank;
- 5) seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- 6) aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf e diatas; dan
- 7) informasi lain.

b. Pasal 3(2)

Bagi Bank Umum Konvensional, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pengungkapan mengenai:

- 1) permodalan bank; dan
- 2) jenis risiko, potensi kerugian, dan penerapan manajemen risiko, paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum.

c. Pasal 3 (4)

Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

d. Pasal 4(1)

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain disampaikan kepada pemegang saham, wajib disampaikan paling kurang kepada:

- 1) Bank Indonesia;
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- 3) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- 4) Asosiasi perbankan di Indonesia;
- 5) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- 6) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
- 7) 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan, paling lama 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.

e. Pasal 4 (2)

Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan disertai surat pengantar penyampaian Laporan Tahunan yang memuat informasi mengenai penyampaian Laporan

Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4(1) huruf 2) sampai dengan huruf 7).

f. Pasal 5 (1)

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

g. Pasal 5 (2)

Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila:

- 1) Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan; dan/atau
- 2) Bank belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) nomor 2) yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (1).
- 3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan.

h. Pasal 6 (1)

Bank wajib mengumumkan Laporan Tahunan dalam *website* Bank.

i. Pasal 6 (2)

Pengumuman Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6(1) paling lama dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

j. Pasal 6 (3)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dalam *website* Bank paling kurang untuk 2 (dua) periode laporan berturut-turut.

3. Laporan Keuangan Konsolidasi

a. Pasal 18 (1)

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

b. Pasal 18 (2)

Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 18 (1) disajikan pada Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

c. Pasal 18 (3)

Bank Indonesia berwenang menetapkan cakupan perusahaan yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank selain yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan.

d. Pasal 18 (4)

Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (1).

Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan pada Laporan Tahunan

e. Pasal 19 (1)

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak dalam menyusun Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selain menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara individual, juga wajib menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi.

f. Pasal 19 (2)

Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (1) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, terdiri atas:

- 1) Laporan Keuangan Konsolidasi Bank;
- 2) Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan;
dan
- 3) Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk.

g. Pasal 19 (3)

Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disajikan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 19 (2) nomor 3).

h. Pasal 19 (4)

Dalam hal audit Laporan Keuangan Tahunan perusahaan lain di luar Bank dilakukan oleh Akuntan Publik yang berbeda dengan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Bank maka Bank dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 (2) wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik

yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) serta opini yang diberikan.

i. Pasal 19 (5)

Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (2), paling kurang meliputi:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- 2) Laporan Laba Rugi Komprehensif;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 4) komitmen dan kontinjensi.

j. Pasal 20

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam Laporan Tahunan selain wajib menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi, juga wajib menyampaikan informasi sebagai berikut:

- 1) struktur kelompok usaha Bank;
- 2) transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak Berelasi;
- 3) transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
- 4) penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu

kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan

- 5) pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (2) secara konsolidasi, bagi Bank Umum Konvensional.

2.1.5. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Menurut Suwardjono (2005), Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Bagi Perbankan di Indonesia merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK dan Bank Indonesia. Pihak manajemen berhak melakukan pengungkapan sukarela sesuai dengan kepentingan perusahaan sehingga terdapat keragaman atau variasi mengenai pengungkapan sukarela antar perusahaan.

2.1.5.1. Teori Dalam Pengungkapan Sukarela

2.1.5.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Godfrey (2010) mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa sesuai dengan keinginan mereka dimana terdapat pendelegasian otoritas dalam pembuatan keputusan kepada agen atau bisa dikatakan bahwa teori agensi fokus pada hubungan dari pemilik perusahaan (*shareholders*) yang mempercayakan kepemilikan kekayaannya untuk dikelola oleh pihak lain dalam hal ini *agency* atau perusahaan. Masalah yang timbul antara *shareholders* dan manajemen perusahaan adalah asimetri informasi dan *agency problem*. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu

transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya, Sedangkan *Agency Problem* merupakan sebuah konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen perusahaan, *shareholders*, maupun kreditor yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dalam tujuan yang ingin dicapai. Pelaporan keuangan adalah salah satu cara mengurangi *agency problem*.

Jika kedua belah pihak merupakan *utility maximizers*, maka merupakan dasar untuk menyatakan bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. *Agency conflict* terjadi ketika manajer cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya daripada kepentingan pemegang saham. *Agency conflict* dapat menimbulkan *agency cost* (biaya agensi), yaitu berupa pemberian sistem insentif bagi agen dari Prinsipal selaku pemilik kekayaan. Pemberian sistem insentif dan dengan menimbulkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang didesain untuk membatasi tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh agen dan untuk membatasi perbedaan kepentingan.

Healy dan Palepu (2001) dalam Nurfadillah (2012) menyatakan bahwa pentingnya *agency problem* dan *agency cost* yang dihasilkan sebagai pembenaran pentingnya pengungkapan sukarela untuk meminimalkan biaya monitoring (*monitoring cost*). Hal ini karena *monitoring cost* dapat mengurangi remunerasi manajer seperti gaji dan bonus, oleh karena itu manajer lebih memilih untuk meningkatkan tingkat pengungkapan yang lebih detil untuk meminimalkan monitoring cost dan menjaga remunerasi mereka. Intinya, manajer dievaluasi, dikompensasi dengan informasi tambahan yang mereka sebarkan dan dengan adanya pengungkapan maka dapat mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara pemegang saham atau investor dengan perusahaan.

2.1.5.1.2. Teori Signal (Signalling Theory)

Suwardjono (2005) menyatakan bahwa teori signal (*signalling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. *Signalling theory* tentang bagaimana perusahaan memberikan signal kepada pengguna laporan keuangan. Manajemen selalu berusaha mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya apabila informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Suwardjono menambahkan bahwa manajemen pun berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin banyak pula pengungkapan sukarela yang disampaikan. Pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan signal positif bagi perusahaan. Pengungkapan sukarela ini merupakan solusi atas kendala pengungkapan secara penuh, dengan ketersediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, maka tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau memadai tidak perlu penuh

Menurut Quiry (2011), pengambilan keputusan dapat terjadi karena adanya signal yang dikirim dari manajer kepada investor. Hal tersebut menjelaskan bahwa insentif mendorong manajer untuk menerbitkan signal yang tepat dan mematahkan manajer dalam menggunakan signal yang menyesatkan tentang gambaran kesehatan keuangan perusahaan.

2.1.5.1.3. Analisa Biaya Manfaat (Cost Benefit)

Horngren (2012) Menyatakan bahwa Pendekatan biaya manfaat (*cost benefit approach*) digunakan untuk membuat keputusan sumber daya dipakai apabila manfaat

yang didapat melebihi biaya yang diperkirakan. Manfaat dan biaya yang diharapkan mungkin tidak mudah untuk diukur. Namun, pendekatan biaya-manfaat berguna untuk membuat keputusan tentang alokasi sumber daya.

Sementara itu analisa biaya manfaat merupakan pertimbangan manajemen dalam melakukan pengungkapan sukarela. Manajemen tentu akan melakukan pengungkapan sukarela bila manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biayanya. Pengungkapan informasi oleh perusahaan diharapkan dapat membantu investor dan kreditor dalam memahami resiko investasi.



2.2 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1

Rangkuman Penelitian Sebelumnya

No.	Judul & Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
1.	<i>Family Ownership, board independence and voluntary disclosure: Evidence from Hongkong</i> (Chau & Gray, 2010)	Independen: 1) <i>Family Ownership</i> 2) <i>Board Independence</i> Dependen : 1) <i>Voluntary disclosure</i>	Perusahaan-perusahaan di Hongkong yang terdaftar pada HKEx tahun 2010.	<i>Board Independence</i> berkaitan positif terhadap tingkat pengungkapan dan mengurangi pengaruh non-eksekutif direktur yang independen dan tingkat kepemilikan keluarga. Pengaruh kepemilikan keluarga seperti ini biasanya terjadi pada perusahaan dengan pimpinan yang tidak independen.
2.	<i>Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure Evidence from listed companies in China</i> (Xiao Huafang and Yuan Jianguo, 2007)	Independen : 1) Kepemilikan <i>Blockholder</i> 2) Kepemilikan Manajerial 3) Kepemilikan <i>legal-person</i> 4) Kepemilikan Pemerintah 5) Kepemilikan Asing 6) Independensi direktur 7) Dualitas Ceo Dependen : 1) Pengungkapan sukarela	Perusahaan-Perusahaan publik di Cina	Kepemilikan <i>blockholder</i> , kepemilikan asing, Independensi Direktur memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela; Dualitas CEO memiliki hubungan negatif dan signifikan; kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dan tidak signifikan; kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan <i>legal-person</i> memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.
3.	Pengaruh struktur kepemilikan, tingkat diversifikasi dan dana pihak ketiga terhadap tingkat pengungkapan sukarela BEI tahun 2007-2009 (Pityt Puty	Independen : 1) Kepemilikan <i>blockholder</i> 2) Kepemilikan pemerintah 3) Kepemilikan institusional 4) kepemilikan asing 5) tingkat diversifikasi 6) jumlah dana pihak ketiga.	Perusahaan Perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2007-2009	Kepemilikan <i>blockholder</i> memiliki hubungan positif dan signifikan; kepemilikan pemerintah pada model yang mengeluarkan variabel insize berpengaruh negatif dan tidak signifikan; kepemilikan institusional pada model yang mengeluarkan variabel insize, berpengaruh positif dan tidak signifikan; Kepemilikan asing, pada model yang mengeluarkan variabel insize, berpengaruh negatif signifikan; Tingkat diversifikasi

	Hariandy, 2010)	Dependen : 1) Pengungkapan sukarela		dan Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia
4.	<i>Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia</i> (Yaseen Al-Janadi, Rashidah Abdul Rahman, Normah Haj Omar, 2013)	Independen: 1) <i>The proportion of non-executive directors</i> 2) <i>The proportion of family members on the board</i> 3) <i>Small board size</i> 4) <i>The independence of audit committee members</i> 5) <i>the separation of the CEO</i> 6) <i>Chairman positions</i> 7) <i>audit quality</i> 8) <i>government ownership</i> Dependen: 1) <i>Voluntary disclosure</i>	87 Perusahaan yang listing di Saudi Arabia	<i>The proportion of non-executive directors on the board</i> memiliki pengaruh Positif, <i>the proportion of family members on the board</i> memiliki pengaruh Negatif, <i>board size</i> dan <i>the Big four audit firms</i> memiliki pengaruh positif signifikan, <i>independent audit committee members</i> memiliki pengaruh statistik tidak signifikan, <i>the separation of the CEO and Chairman positions</i> , Kepemilikan Pemerintah memiliki pengaruh statistik negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela
5.	Pengaruh Efektivitas Dewan komisaris, Komite Audit, Kompleksitas, Karakteristik Aset dan <i>Agency Problem</i> Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela (Anggi Nurfadillah, 2012)	Independen: 1) Dewan komisaris 2) Komite Audit 3) Kompleksitas 4) Karakteristik Aset 5) <i>Agency Problem</i> Dependen : 1) Pengungkapan Sukarela	penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2011. Sampel perusahaan diambil dari tahun 2010 dan 2011	Hasil Penelitian ini untuk Efektivitas dewan komisaris, Efektifitas komite audit, tingkat kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Untuk Karakteristik aset, <i>Agency problem</i> , dan dewan komisaris yang efektif memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap <i>agency problem</i> yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Variabel independen terakhir, Komite Audit yang efektif tidak berpengaruh terhadap <i>agency problem</i> yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.

6.	<p><i>Voluntary Disclosure and Ownership Structure. An Exploratory study of Romanian Listed Companies</i> (Victoria Bogdan, Adila Popa, Cosmina Badalina Pop, Nicoleta Farcane, 2006)</p>	<p>Independen: 1) Kepemilikan Institusional 2) Kepemilikan Asing 3) Kepemilikan Pemerintah</p> <p>Dependen: 1) Pengungkapan Sukarela</p>	<p>Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Bucharest (BSE) Romania Tahun fiskal 2006 dan 2007</p>	<p>Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif pada Tingkat Pengungkapan Sukarela, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan Sukarela.</p>
7.	<p><i>Corporate Governance and Voluntary Disclosure</i> (L.L Eng dan Y.T Mak, 2003)</p>	<p>Independen: 1) Kepemilikan Managerial 2) Kepemilikan Blockholder 3) Kepemilikan Pemerintah 4) Proporsi Direktur luar</p> <p>Dependen: 1) Pengungkapan Sukarela</p>	<p>Perusahaan yang listing di Stock Exchange of Singapore (SES) pada periode 1991-1995</p>	<p>Kepemilikan Managerial memiliki korelasi negatif, Kepemilikan Blockholder memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan, Kepemilikan pemerintah memiliki korelasi positif terhadap tingkat Pengungkapan Sukarela</p>

2.3. Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam skema berikut ini:

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran



Sumber : Penulis

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Struktur Kepemilikan

Struktur Kepemilikan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat jenis investor, yaitu investor *blockholder*, investor pemerintah, investor institusional, dan investor asing. Penelitian ini mengambil empat jenis investor dalam struktur kepemilikan karena keempat investor ini merupakan *proxy* yang relevan dalam melihat komposisi kepemilikan bank-bank di Indonesia, dan *proxy* ini juga telah digunakan dalam penelitian Huafang dan Juanguo (2007), Hariandy (2010) dan Eng dan Mak (2003)

2.4.1.1. Kepemilikan *Blockholder*

Huafang dan Juanguo (2007) mendefinisikan bahwa kepemilikan *blockholder* adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama yaitu kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih dari keseluruhan saham yang beredar yang diterbitkan oleh perusahaan. Fama dan Jensen (1983) dalam Huafang dan Juanguo (2007) mengemukakan bahwa difusi kepemilikan akan menimbulkan potensi konflik antara prinsipal dan agen yang dikenal sebagai *Agency Problem*. *Agency Problem* terjadi karena adanya perbedaan tujuan atau kurangnya keyakinan antara prinsipal yaitu pemegang saham dan agen selaku pihak yang mengelola perusahaan *Agency problem* dapat dikurangi dengan melibatkan pemegang saham substansial dalam memantau atau mengendalikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah. Salah satu bentuk pemantauan atau pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemegang saham substansial adalah evaluasi pengungkapan yang disajikan oleh manajerial. Oleh karena itu, manajerial diperkirakan untuk

mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan untuk mengurangi biaya monitoring terkandung dalam kegiatan pemantauan dan tetap menjaga remunerasi mereka. Denis, Denis dan Sarin (1999) menambahkan bahwa investor *blockholder* (pemegang saham utama) dengan tingkat kepemilikan yang cukup besar tersebut memiliki insentif yang lebih besar untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh manajerial. Huafang dan Juanguo (2007) memberikan dukungan untuk prediksi ini dalam meneliti pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Cina. Mereka menemukan bahwa kepemilikan *Blockholder* memiliki hubungan positif dan signifikan dengan peningkatan pengungkapan sukarela.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Eng & Mak (2003) dan Hariandy (2010) yang meneliti pengaruh Kepemilikan *Blockholder* terhadap pengungkapan sukarela. Mereka menemukan bahwa Kepemilikan *Blockholder* positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan adalah Kepemilikan *Blockholder* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ho1 : Kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha1 : Kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank.

2.4.1.2. Kepemilikan pemerintah

Hariandy (2010) menjelaskan bahwa Kepemilikan Pemerintah merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pemerintah RI atas saham Bank di Indonesia. Thomsen dan Pederson (2000) dalam Hariandy (2010) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah menginternalisasikan hubungan antara pemerintah dan perusahaan baik dalam seluruh kegiatan ataupun tidak, tetapi berfungsi sebagai institusi alternatif terhadap regulasi. Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa pemerintah akan dapat memperoleh informasi dari sumber lain dan mungkin pemerintah juga akan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk saluran pembiayaan yang berbeda dibandingkan perusahaan bukan pemerintah. Xu dan Wang (1999) menambahkan bahwa kepemilikan pemerintah mungkin berfokus hanya pada distribusi kekayaan dan ketertiban sosial dan bukan pada meningkatkan nilai pemegang saham yang menjadi manfaat dari pengungkapan sukarela. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan merupakan hubungan agensi, dan salah satu solusi mengatasi permasalahan agensi adalah sistem pengawasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada perusahaan dengan proporsi kepemilikan pemerintah yang tinggi akan kurang dalam melakukan pengungkapan dikarenakan kepemilikan pemerintah memiliki sedikit intensif untuk memantau atau mengawasi terhadap perusahaan-perusahaan karena tujuannya terutama bukan pada keuntungan, melainkan unsur politik dan sosial.

Didukung oleh penelitian Huafang dan Juanguo (2007) dan Hariandy (2010) yang meneliti pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan sukarela. Mereka menemukan bahwa Kepemilikan Pemerintah pada model yang mengeluarkan variabel insize. Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Pada penelitian lain dilakukan oleh Yaseen Al-

Janadi, Rashidah Abdul Rahman, Normah Haj Omar (2013) meneliti pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap pengungkapan sukarela terhadap 87 Perusahaan yang listing di Saudi Arabia dan menemukan bahwa Kepemilikan Pemerintah berpengaruh statistik negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan adalah Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank.

Ho2 : Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha2 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

2.4.1.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan perusahaan investasi terhadap jumlah saham beredar (Oktoviana, 2009). Thomson dan Pederson dalam Hariandy (2010) mencirikan Kepemilikan investor institusional biasanya memiliki keunggulan dalam hal keuangan karena biasanya perusahaan dapat memperoleh pendanaan ekuitas dari pasar modal, memiliki tingkat penolakan risiko yang rendah dan relatif berinvestasi untuk rentang waktu jangka panjang. Xiao et al (2004) menyatakan Sehubungan dengan kepemilikan institusional, para pemegang saham tersebut memiliki lebih sumber daya dan keahlian untuk memantau perusahaan yang terdaftar daripada investor individu. Selain itu, dibandingkan dengan kepemilikan pemerintahan, kepemilikan institusional memiliki besar intensif untuk memantau perusahaan-perusahaan karena mereka lebih

peduli dengan keuntungan daripada tujuan politik dan sosial. El- Gazzar (1998) menambahkan bahwa besar kepemilikan institusional dapat menyebabkan tingkat yang lebih tinggi dari pengungkapan sukarela.

Bushee dan Noe (2000) dalam Hariandy (2010) menyatakan bahwa investor institusional ini dapat menjadi sensitif terhadap praktik pengungkapan perusahaan untuk beberapa alasan. Pertama, investor institusional akan lebih tertarik pada perusahaan dengan praktik pengungkapan yang informatif bila pengungkapan tersebut mengurangi dampak perdagangan. Kedua, institusi akan sensitif terhadap praktik pengungkapan perusahaan bila pengungkapan dapat mempengaruhi kesempatan perdagangan yang menguntungkan. Ketiga, praktik pengungkapan perusahaan menjadi penting bagi institusi bila institusi tersebut bergantung pada pengungkapan untuk aktivitas tata kelola perusahaan. Dapat dikatakan bahwa investor institusional dapat menjadi sensitif terhadap praktik pengungkapan perusahaan apabila pengungkapan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Hasil serupa terjadi pada penelitian Hariandy (2010) dan Bogdan (2006) yang meneliti pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan sukarela dan menemukan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil yang berbeda telah dilakukan oleh Hufang dan Juanguo (2007). Mereka menemukan bahwa Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Meskipun bukti yang ditemukan berbeda, maka hipotesis yang dikembangkan adalah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank.

Ho3 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

2.4.1.4. Kepemilikan Asing

Hariandy (2010) menjelaskan bahwa Kepemilikan Asing merupakan kepemilikan investor asing yang berasal dari luar negeri atas saham bank yang beroperasi di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan merupakan hubungan agensi, dan salah satu masalah yang timbul antara pemegang saham dan manajemen adalah asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Huafang dan Jianguo (2007) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tingkat asimetri informasi yang tinggi dikarenakan ruang dan bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya pengungkapan maka dapat mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara pemegang saham atau investor dengan perusahaan. Bogdan (2006) menambahkan bahwa pemegang saham asing jauh lebih sadar dengan pentingnya transparansi bisnis dibandingkan dengan orang-orang dalam negeri dan diharapkan bahwa perusahaan dengan mayoritas kepemilikan asing diperkirakan akan memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pelaporan perusahaan dan pengungkapan sukarela. Pernyataan Bogdan (2006) didukung dengan hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) meneliti pengaruh Kepemilikan Asing terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Cina. Mereka menemukan

Kepemilikan Asing memiliki hubungan positif dan signifikan dengan peningkatan pengungkapan sukarela perusahaan dan Bogdan (2006) meneliti pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan sukarela Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Bucharest (BSE) Romania Tahun fiskal 2006 dan 2007 dan Menemukan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Hasil yang berbeda telah dilakukan oleh Hariandy (2010). Mereka menemukan bahwa Pengaruh kepemilikan asing pada model yang mengeluarkan variabel insize, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Meskipun bukti yang ditemukan berbeda, Hipotesis yang dikembangkan adalah Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank.

Ho4 : Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha4 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

2.4.2. Karakteristik Aset Perusahaan (*Assets in Place*)

Karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) merupakan pengalokasian jumlah aset tetap dari total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan (Nurfadillah, 2012). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Jeanjean dan Stolowy (2009) menyatakan bahwa *assets in place* dinyatakan secara independen sebagai kesempatan investasi masa depan perusahaan dan pilihan pertumbuhan yang dinyatakan dengan keputusan investasi masa

depan perusahaan. Butler, Kraft, dan Weiss (2002) menyatakan bahwa perusahaan dengan persentase yang lebih tinggi dari aset berwujud memiliki biaya agensi yang lebih rendah karena lebih sulit bagi manajer untuk menyalahgunakan definisi yang baik dari *assets in place* daripada mengambil nilai dari peluang pertumbuhan yang tidak pasti. Oleh karena itu, karena perusahaan dengan rata-rata *assets in place* yang lebih tinggi mungkin cenderung memiliki biaya agensi yang rendah, dan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pengungkapan sesuai dengan tingkat biaya agensi yang lebih rendah. Karakteristik aset perusahaan dapat mengakibatkan hubungan yang berbanding terbalik antara tingkat pengungkapan dengan proporsi *assets in place* perusahaan. Didukung oleh penelitian Myers (1977) bahwa perusahaan yang memiliki aktiva tetap relatif tinggi mengakibatkan biaya agensi yang lebih rendah dan pengungkapan akibatnya lebih rendah. Hasil sama juga didapat oleh Nurfadillah (2012) yang meneliti pengaruh Karakteristik aset terhadap pengungkapan sukarela dan menemukan hasil bahwa karakteristik aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *agency problem* yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela.

Hasil yang berbeda telah dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) dan Hossain dan Hammami (2009) Mereka menemukan bahwa Pengaruh karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) terhadap pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

Meskipun bukti yang ditemukan berbeda, hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti adalah Karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank.

Ho5 : Karakteristik aset perusahaan (assets in place) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha5 : Karakteristik aset perusahaan (assets in place) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

2.4.3. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing (Bank Indonesia, 2008). Berdasarkan PBI Nomor 10/19/PBI/ 2008 dalam Hariandy (2010) Dana Pihak Ketiga meliputi kewajiban dalam rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, variabel dana pihak ketiga dilihat dari jumlah giro, tabungan, simpanan berjangka/ deposito dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dimiliki Bank terhadap pihak ketiga selain Bank, sebagaimana dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Sebagaimana diatur dalam PBI Nomer: 14/14/PBI/2012 yang menyatakan bahwa Perusahaan perbankan memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya pengungkapan dapat menjadi salah satu perangkat bagi masyarakat penghimpun dana dan pemegang saham untuk mengetahui informasi tersebut. Suwardjono (2005) menambahkan bahwa manajemen selalu berusaha mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya apabila informasi tersebut merupakan kabar baik (*good news*) dan manajemen pun berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan atau disebut pengungkapan sukarela. Beberapa penelitian akademik menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin banyak pula

pengungkapan sukarela yang disampaikan karena pengungkapan yang bersifat sukarela dianggap merupakan signal positif bagi perusahaan.

Penelitian mengenai Dana Pihak Ketiga terhadap pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Hariandy (2010) yang melaporkan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan sukarela Perusahaan Perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2007-2009. Hasil penelitian tersebut adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Meskipun belum banyak yang menggunakan Dana Pihak Ketiga untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap tingkat pengungkapan sukarela, Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Ho6 : Besarnya dana pihak ketiga yang dilaporkan bank tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha6 : Besarnya dana pihak ketiga yang dilaporkan bank berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

2. 4.4. Variabel Pengendali (*Control Variable*)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan dalam mengungkapkan laporan tahunan secara sukarela. Selain dari struktur kepemilikan, karakteristik aset, dan dana pihak ketiga, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol seperti yang dilakukan dalam penelitian Huafang dan Juanguo (2002), dan Nurfadillah (2012). Variabel kontrol adalah

variabel yang digunakan dalam model untuk memasukkan karakteristik masing-masing perusahaan ke dalam persamaan.

2.4.4.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diidentifikasi sebagai variabel penjelas yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam tingkat pengungkapan sukarela dalam penelitian sebelumnya dan telah digunakan sebagai variabel kontrol pada penelitian Huafang dan Jianguo (2007) dan Nurfadillah (2012). Teori yang terkait dengan pengungkapan adalah Teori Agensi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan merupakan hubungan agensi yang akan menimbulkan *agency cost* (biaya agensi). *Agency cost* timbul dari adanya *agency conflict*, *Agency conflict* terjadi ketika manajer cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya daripada kepentingan pemegang saham, yang kemungkinan lebih besar terdapat pada perusahaan yang lebih besar.

Huafang dan Jianguo (2007) menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Sampel yang diambil adalah perusahaan-perusahaan publik di Cina yang terdaftar pada Shanghai Stock Exchange tahun 2002. Huafang dan Jianguo menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki tingkat pengungkapan yang lebih besar. Selanjutnya, Luo et al, (2006) menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Sampel yang diambil adalah perusahaan yang listing di Singapore (SGX) dari tahun 1994-2000. Hasil yang ditemukan adalah perusahaan dengan ukuran yang

lebih besar mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

2.4.4.2. Leverage

Leverage diidentifikasi sebagai variabel kontrol yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam tingkat pengungkapan sukarela dalam penelitian sebelumnya dan telah digunakan sebagai variabel kontrol pada penelitian Huafang dan Jianguo (2007). *Leverage* ditempatkan sebagai variabel kontrol karena pada umumnya perusahaan berusaha meningkatkan pendanaan melalui pinjaman. *Leverage* merupakan tingkat risiko perusahaan. Ahmed dan Courtis (1999) dalam Huafang dan Jianguo (2007) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan menimbulkan biaya monitoring yang lebih tinggi. Dengan demikian, manajer perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi berusaha untuk mengurangi biaya monitoring dengan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan.

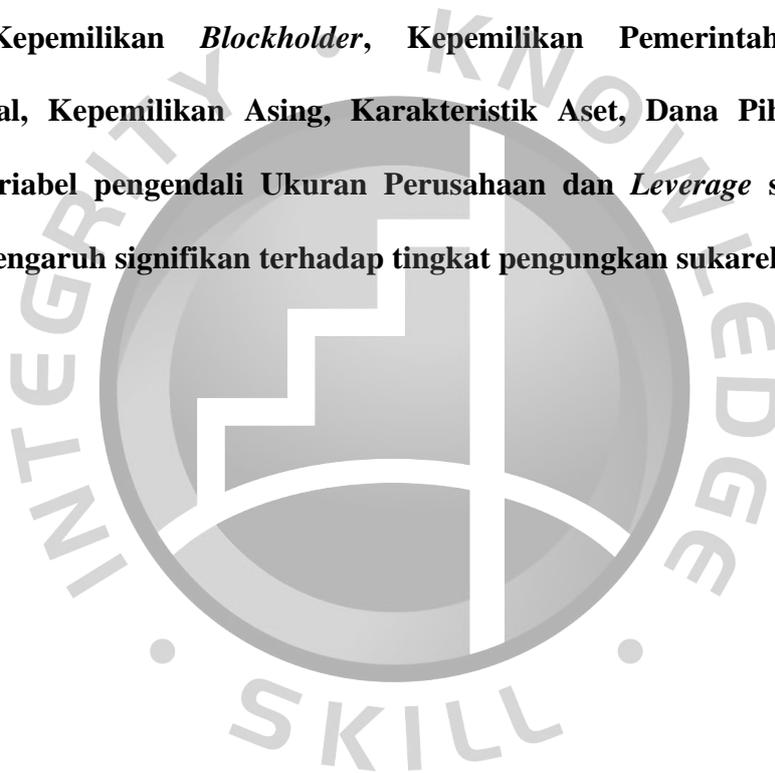
2.4.5. Kepemilikan *Blockholder*, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Karakteristik Aset, Dana Pihak Ketiga, Ukuran Perusahaan dan *Leverage*.

Jika H_0 ditolak atau H_a diterima maka variabel independen dan dependen secara keseluruhan atau beberapa diantaranya dapat menjelaskan perilaku tingkat pengungkapan sukarela. Namun bila sebaliknya, H_0 diterima atau H_a ditolak maka variabel independen tersebut tidak dapat menjelaskan perilaku tingkat pengungkapan sukarela. Hipotesis yang dikembangkan adalah Kepemilikan *Blockholder*, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Karakteristik Aset, Dana

Pihak Ketiga, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Ho7 : Kepemilikan *Blockholder*, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Karakteristik Aset, Dana Pihak Ketiga dan dengan variabel pengendali Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Ha7 : Kepemilikan *Blockholder*, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Karakteristik Aset, Dana Pihak Ketiga dan dengan variabel pengendali Ukuran Perusahaan dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) tahun yaitu, tahun 2012. Populasi yang digunakan adalah Perusahaan yang bergerak di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 32 bank, baik bank swasta maupun nasional.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Data yang dihimpun

Pengujian dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yaitu berupa informasi-informasi yang disajikan dalam annual report atau laporan tahunan perusahaan pada tahun 2012 yang telah resmi dipublikasi di BEI yaitu di website www.idx.co.id, website resmi perusahaan, dan media internet lainnya.

Adapun pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data besarnya nilai proporsi kepemilikan saham diperoleh dari informasi kepemilikan saham yang terdapat di dalam laporan keuangan yang terdapat didalam Laporan Tahunan Bank
2. Data mengenai karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) diperoleh dari Laporan Keuangan Bank pada bagian neraca.
3. Data mengenai Dana Pihak Ketiga diperoleh dari Laporan Keuangan Bank

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan perbankan (baik swasta maupun nasional) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 dan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) lengkap yang telah diaudit per31 desember 2012. Pemilihan sektor tersebut sebagai sampel dikarenakan adanya regulasi yang berbeda antara perusahaan perbankan dengan industri lain mengenai pengungkapan yaitu Bapepam-LK dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan (baik yang swasta maupun nasional) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012.
2. Menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) lengkap beserta laporan keuangan (*financial report*) dan telah diaudit per31 desember 2012.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Untuk mengumpulkan data maka penulis mempelajari studi literatur yang terkait dengan *voluntary disclosure* baik itu berupa jurnal, skripsi, tesis dan penelitian tertulis lainnya.

2. Dokumentasi

Data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perbankan diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id), Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan situs masing-masing perbankan..

3.3. Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Operasional variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

3.3.1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sukarela. Untuk mendapatkan nilai variabel dependen tersebut digunakan suatu sistem penilaian dengan skor (*scoring*). Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela, dalam penelitian ini digunakan metode yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2010) yang diukur melalui *checklist* pengungkapan sukarela, Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Membuat daftar atau *checklist* pengungkapan. Daftar ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan

Checklist disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan yang untuk masing-masing *item* disediakan tempat jawaban mengenai status pengungkapan laporan tahunan yang dianalisis.

2. Menentukan indeks pengungkapan untuk setiap *item* pengungkapan untuk setiap perusahaan sampel berdasarkan checklist yang telah dibuat, dengan cara berikut:
3. Memberi skor untuk setiap *item* pengungkapan. Skor diberi nilai 1 jika *item* informasi pengungkapan dibuat berdasarkan metode pengungkapan sukarela yang telah ditentukan, dan diberi nilai 0 jika *item* pengungkapan informasi tidak dibuat.
4. Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
5. Menghitung indeks kelengkapan pengungkapan sukarela dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor maksimum yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan.

Semakin banyak butir yang diungkapkan oleh perusahaan, semakin banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktek pengungkapan sukarela lebih komprehensif daripada perusahaan lain.

Item-item didalam *checklist* pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi dari checklist pengungkapan sukarela yang digunakan oleh Chau dan Gray (2010) dan telah digunakan di Indonesia pada penelitian Nurfadillah (2012) dan Hariandy (2010), dimana informasi diungkapkan terbagi dalam tiga kategori yaitu:

- a) Informasi Staregis meliputi:
 1. Informasi Umum Perusahaan;
 2. Strategi Perusahaan;
 3. Akuisisi dan Disposasi;
 4. Riset dan Pengembangan; dan
 5. Prospek Masa Mendatang

- b) Informasi Non Keuangan meliputi:
 1. Informasi mengenai Direktur;
 2. Informasi Karyawan;
 3. Kebijakan Sosial dan Informasi Nilai Tambah.

- c) Informasi Keuangan meliputi:
 1. Informasi Segmen;
 2. Tinjauan Keuangan;
 3. Informasi Nilai Tukar; dan
 4. Informasi Harga Saham.

Total pertanyaan awal menurut Chau dan Gray (2010) adalah 85 *Item*. Namun, dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang mewajibkan pelaporan *item-item* tertentu di dalam laporan tahunan Bank, serta melihat relevansi dengan kondisi Bank, maka ada 36 *item* yang dihapuskan karena sudah dikategorikan wajib di Indonesia sehingga total pertanyaan ceklis yang dipakai didalam penelitian ini adalah 49 *item*, Daftar Skor tingkat pengungkapan sukarela terdapat dalam Lampiran 1.

Sedangkan, *Item-item* yang dihapuskan dan disesuaikan di dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Informasi umum perusahaan, yang terdiri dari Riwayat Singkat Perusahaan dan Struktur Organisasi telah dihapuskan seluruhnya dikarenakan telah diwajibkan di dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Prospek Masa Mendatang, tiga *sub-item* dihapuskan, yaitu Informasi Prospek Masa Mendatang (kualitatif), Perkiraan Kualitatif atas Profit dan Asumsi yang mendasari Perkiraan, karena telah diwajibkan di dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dua *sub-item* dari item ini diganti, menyesuaikan dengan relevansinya terhadap Bank. *Sub-item* tersebut adalah perkiraan kualitatif dan kuantitatif atas penjualan diganti menjadi perkiraan kualitatif dan kuantitatif atas pendapatan bunga dan *fee-based income*.
- 3) Informasi Karyawan, Empat *sub-item* dari item ini dihapuskan, yaitu Informasi jumlah waktu dalam pengadaan pelatihan, sumber daya dari pelatihan, kategori karyawan yang menerima pelatihan, jumlah karyawan yang memperoleh pelatihan. Empat *sub-item* pertama dihapuskan karena telah diwajibkan di dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

- 4) Kebijakan sosial dan informasi nilai tambah, yang terdiri dari informasi keamanan produk, program perlindungan lingkungan (kualitatif dan kuantitatif), program masyarakat atau komoditas, informasi nilai tambah, data nilai tambah, rasio nilai tambah, dan informasi nilai tambah (kualitatif) dihapuskan seluruhnya karena informasi ini kurang relevan dengan operasi bank yang menghasilkan jasa.
- 5) Informasi Segmen, empat *sub-item* dari *item* ini dihapuskan, yaitu informasi produksi berdasarkan daerah geografis, lini bisnis produksi, dan analisis kualitatif dan kuantitatif atas pangsa pasar. Sub-item ini dihapuskan karena telah diwajibkan di dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 6) Tinjauan Keuangan, sebelas *sub-item* dari *item* ini dihapuskan, yaitu informasi rasio profitabilitas, Penjelasan kualitatif atas Profitabilitas, Informasi arus kas, Informasi Periklanan – Kualitatif, Rasio likuiditas, revaluasi aset tetap selama lima tahun terakhir, kebijakan pembayaran deviden, ikhtisar keuangan enam tahun terakhir (dihapuskan karena telah diwajibkan di dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik), penyajian kembali informasi keuangan berdasarkan IASC (dihapuskan karena tidak relevan di Indonesia), Informasi efek tingkat bunga terhadap hasil saat ini dan operasi masa mendatang (dihapuskan karena telah diwajibkan di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor nomor: 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

- 7) Informasi Harga Saham, Empat sub-item dari item ini dihapuskan, yaitu Harga saham pada Akhir Tahun, Kapitalisasi pasar pada akhir tahun, informasi tingkat kepemilikan dan jenis pemegang saham.

3.3.2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Ada enam variabel independen utama yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset dan dana pihak ketiga yang akan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada bank-bank di Indonesia tahun 2012.

3.3.2.1. Kepemilikan *Blockholder*

Variabel ini menggunakan *proxy* Proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama yaitu kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih dari keseluruhan saham yang beredar yang diterbitkan oleh bank. Penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Juanguo (2007) menggunakan variabel Kepemilikan *Blockholder* dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Cina dimana untuk mengukur kepemilikan *Blockholder* menggunakan Proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham *substansial* (dengan ekuitas 5 persen atau lebih). Serupa dengan penelitian sebelumnya, Eng & Mak (2003) juga menggunakan Kepemilikan *Blockholder* untuk mengetahui tingkat pengungkapan sukarela, mengukur kepemilikan *blockholder* dengan menggunakan Proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham substansial (dengan ekuitas 5 persen atau lebih). Selanjutnya Hariandy (2010) mengukur kepemilikan *Blockholder* menggunakan Persentase Jumlah kepemilikan saham paling sedikit 5% dari keseluruhan saham beredar yang diterbitkan oleh bank.

3.3.2.2. Kepemilikan Pemerintah

Huafang dan Juanguo (2007) mengambil kepemilikan Pemerintah sebagai Variabel tingkat pengungkapan sukarela, dan menggunakan Proporsi saham biasa yang dimiliki oleh negara. Serupa dengan penelitian sebelumnya, Hariandy (2010) juga menggunakan Kepemilikan Pemerintah sebagai Variabel tingkat pengungkapan sukarela, dan menggunakan Jumlah kepemilikan saham oleh pemerintah RI atas saham bank. Selanjutnya Yaseen Al-Janadi, Rashidah Abdul Rahman, Normah Haj Omar (2013) mengukur kepemilikan Pemerintah dengan menggunakan Jumlah persentase saham ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian Huafang dan Juanguo (2007); Hariandy (2010); Yaseen Al-Janadi, Rashidah Abdul Rahman, Normah Haj Omar (2013) maka untuk mengetahui Kepemilikan Pemerintah menggunakan Persentase Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Negara atau Pemerintah RI.

3.3.2.3 Kepemilikan Institusional

Variabel ini menggunakan *proxy* Proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan perusahaan investasi terhadap jumlah saham beredar. Pengukuran ini serupa dengan penelitian Oktoviana (2009) menggunakan Variabel Kepemilikan Institusional dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, dimana untuk mengukur Kepemilikan Institusional dengan menggunakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusional seperti bank, lembaga asuransi, dan perusahaan investasi terhadap jumlah saham beredar. Penelitian selanjutnya, Huafang dan Juanguo (2007) juga menggunakan Variabel Kepemilikan Institusional untuk menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, dimana untuk mengukur Kepemilikan Institusional dengan menggunakan Proporsi saham biasa yang dimiliki

legal-person. Selanjutnya Hariandy (2010) mengukur Variabel Kepemilikan Institusional dengan melihat kepemilikan bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusional lainnya atas saham bank.

3.3.2.4. Kepemilikan Asing

Hariandy (2010) mengambil Variabel Kepemilikan Asing sebagai Variabel untuk menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, dimana untuk mengukur Kepemilikan Asing dengan menggunakan Jumlah Kepemilikan investor asing atas saham bank di Indonesia. Penelitian lain, Yaseen Al-Janadi, Rashidah Abdul Rahman, Normah Haj Omar (2013) yang juga menggunakan Variabel Kepemilikan Asing untuk menentukan tingkat pengungkapan sukarela, dimana untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan Jumlah persentase saham biasa yang dimiliki oleh investor Asing. Berdasarkan penelitian Hariandy (2010) dan , Yaseen Al-Janadi, Rashidah Abdul Rahman, Normah Haj Omar (2013) maka untuk mengukur Variabel Kepemilikan Asing dengan Proporsi jumlah kepemilikan investor asing atas saham bank di Indonesia.

3.3.2.5. Karakteristik Aset (*Assets in Place*)

Shammari (2008) dalam Nurfadillah (2012) mengambil *assets in place* sebagai determinan tingkat pengungkapan sukarela, dan mengukurnya dengan membagi total aset tetap perusahaan dengan total aset perusahaan secara keseluruhan. Serupa dengan penelitian sebelumnya, Hossain dan Hammami (2009) dalam Nurfadillah (2012) yang juga menggunakan *assets in place* untuk mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan sukarela, menghitung nilai *assets in place* dengan membagi total aset tetap dibagi dengan total aset perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian Shammari (2008); Hossain dan Hammami (2009); Nurfadillah (2012) untuk mengetahui nilai *assets in place* perusahaan dalam penelitian ini, dihitung dengan rasio :

$$\text{Assets in Place} = \frac{\text{Aset Tetap}_{it}}{\text{Total Aset}_{it}}$$

3.3.2.6. Dana Pihak Ketiga

Untuk mendapatkan nilai dari Variabel Dana Pihak Ketiga, dalam penelitian ini, digunakan Logaritma natural dari besarnya dana pihak ketiga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hariandy (2010). Menurut Hariandy (2010), Variabel dana pihak ketiga dilihat dari jumlah giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dimiliki Bank terhadap pihak ketiga selain bank, sebagaimana dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan yang tercantum didalam Laporan Tahunan yang diterbitkan Perusahaan.

3.3.3. Variabel Pengendali (*Control Variable*)

3.3.3.1. Ukuran Perusahaan

Penelitian sebelumnya yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Huafang dan Juanguo (2007), Nurfadillah (2012) dan Adelopo (2011). Huafang dan Juanguo (2007) menggunakan nilai keseluruhan aset perusahaan yang didapat dari laporan tahunan perusahaan. Nurfadillah (2012) dan Adelopo (2011) menggunakan *natural logarithm of total asset* sebagai *proxy* dalam menentukan ukuran perusahaan. Mengacu pada penelitian sebelumnya, untuk mengukur ukuran perusahaan pada penelitian ini, digunakan *natural logarithm of total asset* sebagai *proxy* nya.

3.3.3.2. *Leverage*

Leverage merupakan tingkat risiko perusahaan yang diperoleh dengan membagi total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Juanguo (2007), dalam penelitian ini, cara menentukan *Leverage* adalah dengan rasio *Debt to Total Asset* :

$$Leverage = \frac{Total\ Hutang_{it}}{Total\ Aset_{it}}$$

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum, maksimum, mean dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Dari statistik deskriptif dapat diketahui karakteristik dan kewajaran data observasi untuk menjelaskan serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada outlier dalam observasi yang digunakan.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu,

uji normalitas dilihat dari uji statistik. Uji Statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kormogorov-Smirnov (K-S).

Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H₀ : Data Residual berdistribusi normal

H_A : Data Residual tidak berdistribusi normal.

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Dalam Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance influence factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0.10$ atau sama dengan $VIF \geq 10$.

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot. Bila dalam grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak atau tersebar baik dibawah maupun diatas angka 0 pada sumbu Y, maka dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan memasukkan variabel independen.

3.4.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan model pengujian regresi berganda, Uji ini diperlukan untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi. Signifikan regresi berarti bahwa nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol secara statistika. Jika koefisien regresi sama dengan nol, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebelum menggunakan hasil regresi, akan dilakukan terlebih dahulu asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Hasil yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil regresi yang telah memenuhi asumsi-asumsi tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan SPSS versi 19. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$DSCORE_i = \beta_0 + \beta_1 BLOCK_i + \beta_2 GOVT_i + \beta_3 INSTL_i + \beta_4 FORGN_i + \beta_5 ASSET_i \\ + \beta_6 LNTPF_i + \beta_7 FSIZE_i + \beta_8 DEBT_i + \varepsilon_i$$

Dimana :

DSCORE = Jumlah indeks pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan

BLOCK = Kepemilikan *blockholder* yaitu Proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama (dengan ekuitas 5 persen atau lebih)

GOVT = Kepemilikan pemerintah yaitu Proporsi saham yang dimiliki oleh negara atau pemerintah RI.

INSTL = Kepemilikan institusional yaitu Proporsi saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusional (seperti bank, lembaga asuransi, dan perusahaan investasi)

FORGN = Kepemilikan asing yaitu Proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing atas saham bank di Indonesia

ASSET = Karakteristik aset perusahaan yaitu Fixed Asset / Total Asset

LNTPF = Logaritma natural dari besarnya dana pihak ketiga

FSIZE = Logaritma natural dari total aset

DEBT = *Leverage* yaitu Total Hutang / Total Aset

β_0 = *intercept*

ε = *Residual Error*

3.4.4. Uji Hipotesis

3.4.4.1. Koefisien Determinasi (adjusted R square)

Uji ini digunakan untuk mengetahui persentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Semakin besar R^2 , maka semakin besar variasi dari variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi juga digunakan untuk mengetahui proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.4.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial dilakukan dengan pengujian terhadap probabilitas konstanta dari tiap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan diambil jika nilai probabilitas t dari tiap variabel independen ($\text{sig } t$) lebih kecil dari 5%.

3.4.4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menganalisis nilai probabilitas F ($\text{sig } F$) dengan menggunakan signifikansi alpha sebesar 5%.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode Analisis data statistik deskriptif dengan analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 32 bank, baik bank swasta maupun nasional. Untuk daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, dapat dilihat pada Lampiran 2. Berikut ini adalah tabel untuk kriteria pemilihan sampel penelitian:

Tabel 4.1

Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	N
1 Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012	32
2 Perbankan yang tidak menerbitkan laporan tahunan lengkap yang telah diaudit per31 desember 2012	-
3 Perbankan yang tidak memiliki kelengkapan data	-
4 <i>Outlier</i>	-
Total	32

Sumber : Data diolah penulis

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif yang mendeskripsikan data dari masing-masing variabel yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan nilai standar deviasi :

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DSCORE	32	.37	.67	.5319	.08163
BLOCK	32	44.53	100.00	70.3861	16.20559
GOVT	32	.00	100.00	15.8166	30.25335
INSTL	32	.00	90.90	26.9286	26.75100
FORGN	32	.00	98.94	35.6953	33.32494
ASSET	32	.26	4.21	1.5834	1.08855
LNTPF	32	15.00	19.00	16.9063	1.20106
LNSIZE	32	15.00	19.00	17.3750	1.40850
LEV	32	.65	.93	.8774	.05379
Valid N (listwise)	32				

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas, nilai rata-rata untuk pengungkapan sukarela dari 32 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 adalah sebesar 0,5319 atau sebesar 53,19% dari 49 item pengungkapan sukarela dengan standar deviasi 0,08. Nilai terendah indeks pengungkapan sukarela laporan tahunan tahun 2012 adalah 0,37 yang dimiliki oleh Bank

Capital Indonesia. Hal ini berarti bahwa Bank Capital Indonesia hanya mengungkapkan 19 item dari 49 item pengungkapan sukarela. Nilai tertinggi indeks pengungkapan sukarela laporan tahunan tahun 2012 adalah 0,67 yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga yang berarti telah mengungkapkan 33 item dari 49 item pengungkapan sukarela. Bank CIMB Niaga merupakan bank umum, bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank CIMB Niaga menjadi perusahaan terbuka dengan dicatatnya saham CIMB Niaga pada Bursa Efek Indonesia mulai tahun 1989 berarti bank CIMB Niaga telah menjadi Perusahaan terbuka selama 23 tahun dan terus berkembang tiap tahunnya. Secara keseluruhan, informasi yang dicantumkan dalam laporan tahunan bank CIMB Niaga tahun 2012 telah mengikuti referensi dari Otoritas Jasa Keuangan, BAPEPAM-LK.

Untuk variabel independen pertama yaitu kepemilikan *blockholder* (BLOCK), yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama (dengan ekuitas 5 persen atau lebih). Nilai rata-rata variabel kepemilikan *blockholder* adalah sebesar 70,38, Nilai ini menunjukkan masih besarnya proporsi kepemilikan *blockholder* pada bank-bank di Indonesia. Dan standar deviasi 16,20. Besarnya proporsi kepemilikan *blockholder* mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi. Nilai terendah dari variabel kepemilikan *blockholder* adalah sebesar 44,53 yang dimiliki oleh Bank Victoria International sementara nilai tertinggi adalah 99,996 yang dimiliki oleh Bank Mutiara.

Untuk variabel independen kedua yaitu kepemilikan pemerintah (GOVT), yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh negara atau pemerintah RI. Nilai rata-rata variabel kepemilikan pemerintah adalah sebesar 15,81 dengan standar deviasi 30,25. Nilai terendah dari variabel kepemilikan pemerintah adalah sebesar 0 yang dimiliki oleh

Bank Artha Graha International, Bank Bumi Arta, Bank Capital Indonesia, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Ekonomi Raharja, Bank Himpunan Saudara, Bank ICB Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Kesawan, Bank Mayapada International, Bank Mega, Bank NISP OCBC, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank Pundi Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga, Bank Sinar Mas, Bank Swadesi, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Victoria Internasional dan Bank Windu Kentjana International. Sebagian besar dari bank tersebut merupakan Bank Milik swasta dan Bank swasta asing. Nilai tertinggi sebesar 99,996 atau 100 yang dimiliki oleh Bank Mutiara yang hampir seluruhnya dipegang Lembaga Penjamin Simpanan (Pemerintah).

Untuk variabel independen ketiga yaitu kepemilikan institusional (INSTL), yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusional seperti bank, lembaga asuransi dan perusahaan investasi. Nilai rata-rata variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 26,92 dengan standar deviasi 26,75. Nilai terendah dari kepemilikan institusional adalah sebesar 0 yang dimiliki oleh Bank Capital Indonesia, Bank Central Asia, Bank Mutiara, Bank CIMB Niaga dan Bank Tabungan pensiunan nasional. Sebagian besar dari bank tersebut merupakan bank yang kepemilikannya berasal dari investor asing dan pemerintah. Nilai tertinggi dari kepemilikan institusional adalah sebesar 90,90 yang dimiliki oleh Bank Bumi Arta atas kepemilikan saham PT Surya Husada Investment, PT Dana Graha Agung dan PT Budiman Kencana Lestari.

Untuk variabel independen keempat yaitu kepemilikan asing (FORGN), yang diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing atas saham bank di Indonesia. Nilai rata-rata variabel kepemilikan asing adalah sebesar 35,69 dengan standar deviasi 33,32. Nilai terendah dari kepemilikan asing adalah sebesar 0 yang

dimiliki oleh Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank Mega, Bank Mutiara, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga dan Bank Windu Kentjana International. Sebagian besar dari Bank tersebut adalah bank kepemilikan pemerintah dan milik perusahaan berbadan hukum di Indonesia. Nilai tertinggi dari kepemilikan asing adalah sebesar 98,94 yang dimiliki oleh Bank Ekonomi Raharja atas kepemilikan HSBC Asia Pacific Holding (UK) Limited.

Untuk variabel independen kelima yaitu karakteristik aset, yang diukur dengan membagi total aset tetap dibagi dengan total aset perusahaan secara keseluruhan. Nilai rata-rata karakteristik aset adalah sebesar 1,58 dengan standar deviasi 1,08. Nilai terendah dari variabel karakteristik aset adalah sebesar 0,26 yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Nilai tertinggi dari karakteristik aset adalah sebesar 4,21 yang dimiliki oleh Bank Pundi Indonesia.

Untuk variabel independen keenam yaitu dana pihak ketiga, yang diukur dengan menggunakan Logaritma natural dari besarnya dana pihak ketiga. Nilai rata-rata dari variabel dana pihak ketiga adalah sebesar $\ln 16,90$ dengan standar deviasi $\ln 1,20$. Nilai terendah dari variabel dana pihak ketiga adalah sebesar $\ln 15$ yang dimiliki oleh Bank Kesawan Tbk, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk dan Bank Swadesi Tbk. Nilai tertinggi dari variabel dana pihak ketiga adalah sebesar $\ln 19$ yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga Tbk. Bank CIMB Niaga Tbk memiliki dana pihak ketiga yang tersebar meliputi jumlah giro, tabungan, simpanan berjangka/deposito dan kewajiban-kewajiban lainnya yang dimiliki Bank terhadap pihak ketiga bank.

Ukuran Perusahaan yang digunakan dalam pengujian merupakan hasil nilai logaritma natural total aset yang tercatat pada laporan tahunan perusahaan. Nilai rata-rata ukuran perusahaan yang diteliti sebesar $\ln 17,3750$ dengan standar deviasi sebesar

Ln1,40850. Nilai total aset terbesar yaitu Ln 19.00 yang dimiliki Bank Central Asia tbk, Bank CIMB Niaga tbk, Bank Danamon Indonesia tbk, Bank International Indonesia tbk, Bank mandiri (Persero) tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) tbk, Bank Pan Indonesia tbk, Bank Permata tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk dan Bank Tabungan Negara (Persero) tbk. Nilai total aset yang terkecil yaitu Ln15 yang dimiliki oleh Bank Bumi Arta tbk, Bank Kesawan tbk dan Bank BRI Agro Niaga tbk.

Rasio *leverage* yang digunakan dalam pengujian ini adalah *debt to total assets ratio*. Nilai rata-rata *leverage* yang diteliti sebesar 0.8774 dengan standar deviasi sebesar 0.05379. Nilai terendah dari rasio *leverage* adalah sebesar 0.65 yang dimiliki oleh Bank Sinar Mas tbk dan Nilai tertinggi dari rasio *leverage* adalah sebesar 0.93 yang dimiliki oleh Bank Himpunan Saudara 1906 tbk.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji residual berdistribusi normal atau tidak yaitu menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat *Kormogorov-Smirnov Z*. Data memiliki distribusi normal apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 0.05$. Hipotesis pada uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05166175
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.521
Asymp. Sig. (2-tailed)		.949

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji Kormogorov-Smirnov Z terlihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh ialah 0.949 lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 0.05$ maka H_0 tidak dapat ditolak yang artinya data terdistribusi secara normal.

4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau disebut juga variabel independen serta variabel pengendali atau disebut juga variabel kontrol (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas disalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan Variance Influence Factor (VIF) lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.241	.247		-.977	.339					
BLOCK	-.001	.001	-.143	-.801	.432	.014	-.165	-.106	.548	1.823
GOVT	.000	.001	.086	.372	.713	.110	.077	.049	.326	3.068
INSTL	.000	.001	.115	.425	.675	-.233	.088	.056	.236	4.245
FORGN	.001	.001	.294	1.010	.323	.231	.206	.133	.206	4.865
ASSET	-3.321E-5	.012	.000	-.003	.998	-.229	-.001	.000	.688	1.453
LNTPF	.068	.027	1.007	2.518	.019	.747	.465	.332	.109	9.177
LNSIZE	-.017	.023	-.295	-.733	.471	.671	-.151	-.097	.108	9.268
LEV	-.086	.224	-.057	-.382	.706	.055	-.079	-.050	.798	1.254

a. Dependent Variable: DSCORE

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil dari tabel tersebut diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

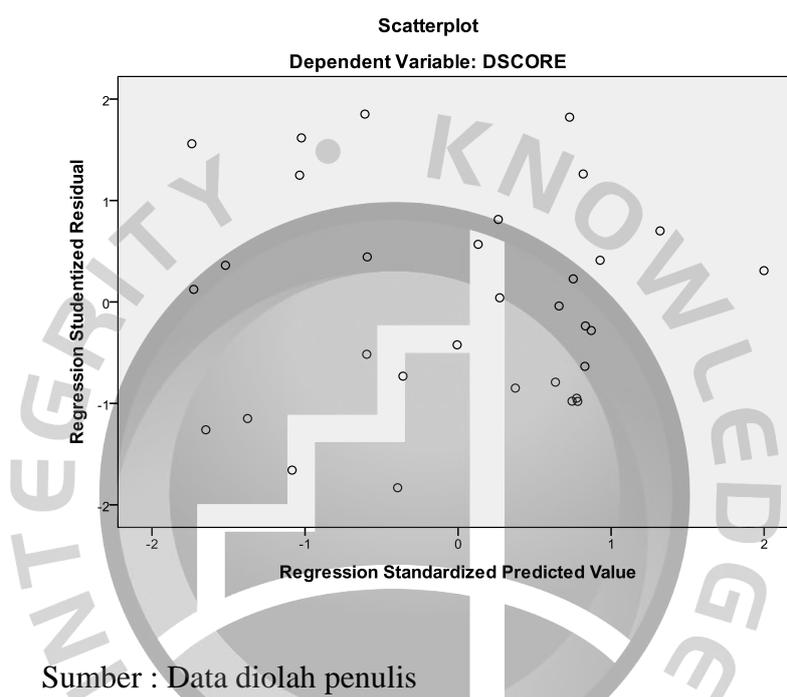
4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian atau ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi

adanya heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan scatter plot yang menggambarkan hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Pada grafik *scatter plot* diatas terlihat titik menyebar secara acak atau tersebar baik dibawah maupun diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengungkapan sukarela berdasarkan variabel bebasnya yaitu, Kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset dan dana pihak ketiga.

4.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel yang menunjukkan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel hasil uji t.

Dari tabel tersebut didapat nilai koefisien dari masing-masing variabel yang dapat dimasukkan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{DScore} = -0,241 - 0,001 \text{ BLOCK} + 0,000 \text{ GOVT} + 0,000 \text{ INSTL} + 0,001 \text{ FORGN} - 0,000033 \text{ ASSET} + 0,068 \text{ LNTPF} - 0,017 \text{ LNSize} - 0,086 \text{ LEV}$$

1. Koefisien konstanta sebesar -0,241 memiliki arti jika seluruh variabel independen dianggap konstan maka tingkat pengungkapan sukarela turun sebesar 0,241. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan enggan melakukan pengungkapan melebihi yang diwajibkan jika tidak ada faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengungkapan sukarela.
2. Koefisien regresi kepemilikan *blockholder* bernilai -0,001 artinya variabel kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel kepemilikan *blockholder* mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami penurunan sebesar -0,001 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.
3. Koefisien regresi kepemilikan pemerintah bernilai 0,000 artinya variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel kepemilikan pemerintah mengalami kenaikan 1 satuan,

maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami kenaikan sebesar 0,000 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.

4. Koefisien regresi kepemilikan institusional bernilai 0,000 artinya variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel kepemilikan institusional mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami kenaikan sebesar 0,000 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.
5. Koefisien regresi kepemilikan asing bernilai 0,001 artinya variabel kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.
6. Koefisien regresi karakteristik aset bernilai -0,000033 artinya variabel karakteristik aset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami penurunan sebesar 0,000033 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.
7. Koefisien regresi dana pihak ketiga bernilai 0,065 artinya variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel dana pihak ketiga mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami kenaikan sebesar 0,0065 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.

8. Koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai -0,017 artinya variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami penurunan sebesar -0,017 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.
9. Koefisien regresi *Leverage* bernilai -0,086 artinya variabel *Leverage* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Jika variabel *Leverage* mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat pengungkapan sukarela akan mengalami penurunan sebesar -0,086 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak berubah.

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Koefisien Determinasi

Hasil output SPSS 19 yang berkaitan dengan nilai koefisien determinasi atau yang dinotasikan dengan adjusted R square, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.774 ^a	.599	.460	.05998	.599	4.302	8	23	.003

a. Predictors: (Constant), LEV, GOVT, BLOCK, LNTPF, ASSET, INSTL, FORGN, LNSIZE

b. Dependent Variable: DSCORE

Sumber : Data diolah penulis

Sesuai dengan hasil olahan SPSS 21, nilai *adjusted R²* diperoleh sebesar 0,460. Berarti, probabilitas pengungkapan sukarela laporan tahunan dapat diterangkan dengan variabel independen yaitu variabel kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset, dana pihak ketiga dan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage sebesar 46,0%, sedangkan sisanya sebesar 54% diterangkan oleh variabel lainnya.

4.4.2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan hasil uji t:

Tabel 4.7

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.241	.247		-.977	.339
BLOCK	-.001	.001	-.143	-.801	.432
GOVT	.000	.001	.086	.372	.713
INSTL	.000	.001	.115	.425	.675
FORGN	.001	.001	.294	1.010	.323
ASSET	-3.321E-5	.012	.000	-.003	.998
LNTPF	.068	.027	1.007	2.518	.019
LNSIZE	-.017	.023	-.295	-.733	.471
LEV	-.086	.224	-.057	-.382	.706

a. Dependent Variable: DSCORE

Sumber : Data diolah penulis

Hipotesis 1

Ho1 : Kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha1 : Kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Variabel kepemilikan *blockholder* (BLOCK) diukur dengan Proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham utama (ekuitas 5 persen atau lebih) dari total saham yang beredar yang dimiliki masing-masing bank. Nilai koefisien untuk variabel kepemilikan *Blockholder* adalah sebesar -0,001 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,432 jauh diatas dari alpha 0,05. Hal ini berarti variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Nilai kepemilikan *blockholder* yang tinggi ternyata tidak menentukan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela. Hasil ini sama dengan yang dilakukan oleh Eng & Mak (2003) dan Hariandy (2010) bahwa kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini dapat terjadi karena signifikansi informasi yang terkandung didalam pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia tidak begitu besar bagi investor *blockholder* atau tidak menjadi hal yang diperhatikan bagi investor *blockholder* selaku pemegang saham pengendali perusahaan. Pemegang saham menilai informasi tambahan atau pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dianggap akan menimbulkan biaya yaitu *monitoring cost dan agency cost* yang diperkirakan akan melebihi manfaat yang akan didapatkan, maka diperkirakan manajerial tidak mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan karena tidak mempengaruhi insentif yang mereka dapatkan. Selain itu, berdasarkan data yang didapat dari Laporan Tahunan perusahaan periode

2012, mayoritas investor *blockholder* berasal dari investor institusional yang akan sensitif terhadap pengungkapan sukarela bila pengungkapan yang disajikan suatu perusahaan mampu mengurangi dampak perdagangan, mempengaruhi kesempatan perdagangan yang menguntungkan, serta pengungkapan menjadi penting bagi institusi bila institusi tersebut bergantung pada pengungkapan untuk aktivitas tata kelola perusahaan atau investor institusional akan sensitif terhadap pengungkapan apabila manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. (Bushee dan Noe, 2000 dalam Hariandy,2010)

Ho2 : Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha2 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Nilai koefisien untuk variabel kepemilikan Pemerintah adalah sebesar 0,000 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,713 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini berarti variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil yang sama dilakukan oleh Huafang dan Juanguo (2007) dan Hariandy (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena di Indonesia sudah terdapat BAPEPAM-LK dan BI serta peraturan-peraturan yang mengatur pengungkapan yang dilakukan oleh Perbankan yang listing di BEI sehingga pemerintah Indonesia sebagai investor akan lebih memperhatikan pada kesesuaian pengungkapan yang dilakukan bank-bank tersebut terhadap peraturan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan informasi tambahan atau pengungkapan sukarela yang

diungkapkan oleh perusahaan, maka dari itulah pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia mungkin bukan menjadi perhatian utama bagi investor pemerintah.

Penyebab pendukung lain yang menyebabkan kepemilikan pemerintah tidak mempengaruhi signifikansi terhadap pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia dikarenakan pemerintah selaku investor telah memiliki mekanisme pengawasan tersendiri selain evaluasi pengungkapan dari laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan, yaitu melalui hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang melakukan pengawasi dan mengatur perbankan di Indonesia.

Ho3 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Nilai koefisien untuk variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,000 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,675 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini berarti variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil yang sama ditemukan oleh Huafang dan Juanguo (2007) dan Hariandy (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank. Hal ini dapat terjadi karena pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia belum memiliki dampak yang signifikan bagi investor institusional yang ada. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bushee dan Noe (2000) dalam Hariandy (2010) bahwa investor institusional akan sensitif terhadap pengungkapan bila pengungkapan yang disajikan suatu perusahaan mampu mengurangi

dampak perdagangan, mempengaruhi kesempatan perdagangan yang menguntungkan, serta penting bagi institusi bila institusi tersebut bergantung pada pengungkapan untuk aktivitas tata kelola perusahaan. Dalam kata lain bahwa investor institusional akan sensitif terhadap pengungkapan bila pengungkapan tersebut memberikan manfaat yang cukup besar dibanding dengan biaya dari pengungkapan sukarela itu sendiri.

Ho4 : Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha4 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Nilai koefisien untuk variabel kepemilikan asing adalah sebesar 0,001 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,323 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini berarti variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil yang sama dilakukan oleh Hariandy (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Berdasarkan data yang sudah ada, rata-rata kepemilikan asing yaitu 35,69% yang artinya keberadaan investor asing pada perusahaan perbankan di Indonesia bukan merupakan kepemilikan mayoritas dan keberadaan investor asing belum berpengaruh cukup besar terhadap praktik pengungkapan sukarela pada perusahaan perbankan yang berada di Indonesia dan hal ini dapat terjadi karena investor asing hanya melakukan investasi jangka pendek di Indonesia.

Ho5 : Karakteristik aset perusahaan (assets in place) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha5 : Karakteristik aset perusahaan (assets in place) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Nilai koefisien untuk variabel karakteristik aset adalah sebesar -0,000033 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,998 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini berarti variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hasil serupa dilakukan oleh Nurfadillah (2012) yang menyatakan bahwa karakteristik aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Hal tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik aset yang diukur dengan membagi aset tetap dengan total aset perusahaan perbankan tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan mereka.

Ho6 : Besarnya dana pihak ketiga yang dilaporkan bank tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Ha6 : Besarnya dana pihak ketiga yang dilaporkan bank berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank

Nilai koefisien untuk variabel dana pihak ketiga adalah sebesar 0,068 dengan probabilitas signifikan sebesar 0.019 ($0,000 < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa variabel dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya dana pihak ketiga yang dilaporkan bank berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela bank tidak dapat ditolak (H_a diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah dana pihak ketiga bank maka semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh bank di Indonesia. Hasil serupa dilakukan oleh Hariandy (2010) menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga

berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil tersebut dapat terjadi karena semakin besarnya dana pihak ketiga maka semakin besar jumlah aset perusahaan yang dihimpun dari masyarakat serta investor yang dimiliki perusahaan perbankan dan semakin besar kewajiban perusahaan perbankan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar pihak investor mengetahui secara jelas dan merasa aman terhadap bank tersebut. Informasi yang diberikan kepada investor dilakukan melalui pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan perbankan baik yang diwajibkan maupun yang sifatnya sukarela karena pengungkapan yang bersifat sukarela dianggap sebagai signal positif atau berita baik (*good news*) dari perusahaan kepada investor yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan. (Suwardjono, 2005)

Sementara variabel kontrol seperti Ukuran perusahaan dan *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln total aset tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, yang berarti ukuran perusahaan yang dilihat dari besarnya total aset tidak dapat menjamin adanya pengungkapan yang lebih dari perusahaan dan begitu pula sebaliknya, ukuran perusahaan yang kecil yang dilihat dari besarnya total aset tidak menjamin bahwa pengungkapan yang lebih sedikit. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang telah dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan yang besar akan memiliki tingkat pengungkapan yang lebih besar.

Variabel *leverage* yang diproxykan dengan membagi total hutang dengan total aset dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan

sukarela, yang berarti bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi belum tentu akan mempengaruhi manajer perusahaan dalam mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

4.4.3. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.124	8	.015	4.302	.003 ^a
	Residual	.083	23	.004		
	Total	.207	31			

a. Predictors: (Constant), LEV, GOVT, BLOCK, LNTPF, ASSET, INSTL, FORGN, LNSIZE

b. Dependent Variable: DSCORE

Hipotesis 7

Ho7 : Kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset, data pihak ketiga, ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Ha7 : Kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset, data pihak ketiga, ukuran perusahaan dan

***leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.**

Pada tabel ANNOVA diatas, nilai F sebesar 4,302 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa keenam variabel independen secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia di tahun 2012. Dengan kata lain hipotesis alternatif tidak dapat ditolak.



4.5. Implikasi Manajerial

Setelah dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran terhadap perbankan secara umum. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, maka diharapkan bank bisa lebih memperhatikan variabel tersebut.

Poin pertama, dengan semakin besarnya dana pihak ketiga maka semakin besar jumlah aset perusahaan yang dihimpun dari masyarakat serta investor lainnya dan semakin besar kewajiban perusahaan perbankan untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar pihak investor mengetahui secara jelas dan merasa aman terhadap bank tersebut. Informasi yang diberikan kepada investor dilakukan melalui pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan perbankan dalam menjunjung transparansi, akuntabilitas, responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan) dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Perbankan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena itu, bank yang memiliki dana pihak ketiga yang besar akan melakukan pengungkapan yang seluas-luasnya baik yang diwajibkan oleh BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia maupun diluar pengungkapan wajib yang dinamakan pengungkapan sukarela. Dikarenakan, pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan signal positif atau berita baik (*good news*) yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan bank itu sendiri.

Poin kedua, dengan adanya lembaga pengawas industri keuangan yang baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan beralihnya fungsi Bapepam-LK, diharapkan perusahaan perbankan akan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan ketentuan baru tentang penyampaian dan transparansi laporan tahunan emiten atau perusahaan perbankan demi terselenggaranya industri keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri informasi, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada 32 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel kepemilikan *blockholder* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hasil tersebut dikarenakan signifikansi informasi yang terkandung didalam pengungkapan sukarela bank-bank di Indonesia tidak begitu besar bagi investor *blockholder* karena pemegang saham menilai informasi tambahan atau pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dianggap akan menimbulkan biaya yaitu *monitoring cost dan agency cost* yang diperkirakan akan melebihi manfaat yang akan didapatkan.
2. Variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hasil tersebut dikarenakan pemerintah selaku investor memiliki mekanisme pengawasan tersendiri selain melalui evaluasi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu melalui hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK.
3. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hasil tersebut dikarenakan Investor institusional akan tidak sensitif terhadap pengungkapan bila pengungkapan

tersebut diperkirakan memberikan biaya yang cukup besar dibanding dengan manfaat yang didapatkan dari pengungkapan sukarela itu sendiri.

4. Variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hasil tersebut dikarenakan Rata-rata kepemilikan asing yaitu 35,69% yang keberadaan investor asing belum berpengaruh cukup besar terhadap praktik pengungkapan sukarela pada Perusahaan perbankan yang berada di Indonesia.
5. Variabel karakteristik aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hasil tersebut dikarenakan karakteristik aset perusahaan yang diukur dengan membagi aset tetap terhadap total aset tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan mereka.
6. Variabel besarnya dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.
7. Secara simultan, variabel kepemilikan *blockholder*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, karakteristik aset dan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010.
8. Variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan pemeliti sebagai berikut :

1. Bagi Regulator meliputi Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam-LK dan Bank Indonesia

Sebagai lembaga pengawas industri keuangan yang baru yang memiliki fungsi mengatur dan mengawasi Pasar modal dan Perusahaan Perbankan, diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan tersebut lebih mengawasi, mengevaluasi dan meninjau kembali aspek-aspek yang penting yang harus diungkapkan oleh perusahaan perbankan di Indonesia dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga dengan lebih mengungkapkan informasi tersebut, para pengguna laporan tahunan, seperti Investor, karyawan, Kreditur, Debitur, Pelanggan, Pemerintah dan Masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana pada perusahaan perbankan di Indonesia. Untuk Bapepam-LK dan Bank Indonesia yang secara resmi tugas pengawasan dan pengaturan perbankan yang terdaftar di Pasar Modal telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan tetap memberikan dukungan penuh serta memberikan masukan demi terciptanya industri keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan aspek-aspek penilaian pengungkapan sukarela atau menggunakan teknik *checklist* yang berbeda yang lebih beragam dan menggunakan industri yang berbeda, hal ini

dikarenakan Banyak industri yang memiliki ketentuan yang beragam didalam pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh masing-masing perusahaan. Selain itu, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun observasi saja, disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah jumlah tahun agar hasil yang didapatkan lebih baik dan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, seperti contoh: efektifitas dewan komisaris, komite audit atau kompleksitas.

3. Bagi Perusahaan Perbankan

Sebagai badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit, diharapkan Perusahaan Perbankan dapat lebih memperhatikan informasi yang tersaji dalam laporan tahunan mereka, dikarenakan informasi dalam laporan tahunan sangatlah penting bagi pengguna informasi, seperti: Investor, karyawan, Kreditur, Debitur, Pelanggan, Pemerintah dan Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, Yuliana Spica. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela "internet financial and sustainability reporting"*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol. 12 No. 2 Desember 2008
- Al-Janadi, Yaseen., Rahman, Rashidah Abdul., and Omar, Normah Haj. 2013. *Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia*. Research Journal of Finance and Accounting Vol.4, No.4 2013
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2012 *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.2012. *Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta
- Botoson, Christine A. 1997 *"Disclosure Level and the Cost of Equity Capital."* The Accounting Review 72.3
- Bogdan, Victoria. 2006. *Voluntary Disclosure and Ownership Structure. An Exploratory study of Romanian Listed Companies*
- Chau, Gerald K. And Sidney J. 2010. *Family ownership, board of independent and voluntary disclosure: evidence from Hongkong*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19, 93-109
- Darrough, Masako N. 1993. *Disclosure Policy and Competition Cournot vs Bertrand*. The Accounting Review 68:3
- Ghozali, Imam. 2011 *Aplikasi Analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19, edisi ke lima*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Godfrey, et al. 2010. *Accounting Theory*.7th ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Gray, S., J., dan Roberts, C. B. 1989. *Voluntary Information disclosure and the British Multinationals: Corporate Perceptions of Costs and Benefits. International Pressures of Accounting Changes*. Hemel Hempstead: Prentice Hall, pp.
- Hariandy, Pityt Puty. 2010. *Analisis Pengaruh struktur kepemilikan, tingkat diversifikasi, dan dana pihak ketiga terhadap tingkat pengungkapan sukarela (studi empiris pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009)*. Jakarta

- Hossain, Mohammed. and Hammami, Helmi. 2009. *Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. Advance in Accounting, incorporating Advances in International Accounting.*
- Horngren, et al. 2009. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis.* New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hossain, Mohammed. and Reaz, Masrur. 2007. *The determinants and characteristics of voluntary disclosure by indian banking compaies.*
- Huafang, Xiao. And Jianguo, Yuan. 2007. *Ownership structure, word composition and corporat voluntary disclosure; evidence from listed companies in China.* Journal of Managerial auditing Vol, 22(6)
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2012).* Jakarta
- Kieso, Donald E.; Weygant, Jerry J.; Warfield, Terry D. 2011 *Intermediate Accounting Volume 1.* John Wiley & Sons. United States of America
- Kieso, Donald E.; Weygant, Jerry J.; Warfield, Terry D. 2011 *Intermediate Accounting Volume 2.* John Wiley & Sons. United States of America
- Lang, Mark H. And Russel J. Lundhom. 1996 “*Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior.*” The Accounting Review 71:4
- Latumaerissa, Julius R. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.*Salemba Empat. Jakarta
- Nurfadillah, Anggi. 2012. *Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kompleksitas, Karakteristik Aset dan Agency Problem Peusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela.* Jakarta
- Oktoviona, Ardiansih. *Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007).* Jakarta
- Pangestika, Mulita. 2012. *Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011.* Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : Nomor 14/14/PBI/2012 *tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/50/PBI/2005 terkait *laporan berkala Bank Umum yang mewajibkan pelaporan item-item tertentu di dalam laporan tahunan Bank.* Jakarta
- Polulus, Sugiono. 2009. *Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Porsi Kepemilikan Saham Publik Terhadap Tingkat Pengungkapan Infoemasi Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Pada 80 Emiten yang*

Tergabung Dalam Indeks Kompas 100 Tahun 2008 di Bursa Efek Indonesia). Bandung

Quiry, et al. 2011. *Corporate Finance: Theory and Practice. United Kingdom:* John Wiley and Sons.

Suwardjono. 2006. *Teori akuntansi Edisi ketiga*. BPBE. Yogyakarta

Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik & Aplikasi)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta



LAMPIRAN 1

Daftar *Checklist* Pengungkapan Sukarela

Sumber : Chau and Gray (2010) dengan penyesuaian Keputusan BAPEPAM-

LK dan Peraturan Bank Indonesia

No.	RINCIAN <i>CHECKLIST</i> PENGUNGKAPAN SUKARELA	Y	N
	A. STRATEGIS PERUSAHAAN		
1.	Uraian strategi dan tujuan – keuangan		
2.	Uraian strategi dan tujuan – pemasaran		
3.	Uraian strategi dan tujuan – sosial		
4.	Dampak strategi terhadap hasil saat ini		
5.	Dampak strategi terhadap hasil saat ini		
	B. AKUISISI DAN DISPOSAL		
6.	Alasan Akuisisi		
7.	Alasan melakukan Disposal		
	C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (R&D)		
8.	Deskripsi dari proyek R&D		
9.	Kebijakan perusahaan atas R&D		
10.	Lokasi dari Aktifitas R&D		
11.	Jumlah Karyawan yang terlibat di dalam R&D		
	D. PROSPEK MASA MENDATANG		
12.	Perkiraan kualitatif atas pendapatan bunga dan <i>fee-based income</i>		
13.	Perkiraan kuantitatif atas pendapatan bunga dan <i>fee-based income</i>		
14.	Perkiraan kuantitatif atas Profit		
15.	Perkiraan kualitatif atas Arus Kas		
16.	Perkiraan kuantitatif atas Arus Kas		
	E. INFORMASI MENGENAI DIREKSI		
17.	Other directorship yang dipegang oleh Dewan Direksi		
18.	Other directorship yang dipegang oleh Dewan Komisaris		
	F. INFORMASI MENGENAI KARYAWAN		
19.	Persebaran karyawan berdasarkan geografis		
20.	Persebaran karyawan berdasarkan lini bisnis		
21.	Kategori karyawan berdasarkan jenis kelamin		
22.	Kategori karyawan berdasarkan fungsi		
23.	Jumlah Karyawan yang bekerja dua tahun atau lebih		

	F. INFORMASI MENGENAI KARYAWAN	Y	N
24.	Alasan perubahan jumlah atau kategori karyawan sepanjang waktu		
25.	Informasi kesejahteraan karyawan		
26.	Kebijakan keselamatan		
27.	Data kecelakaan		
28.	Biaya atas pengukuran keselamatan		
29.	Kebijakan alur komunikasi		
30.	Kelebihan informasi		
31.	Pernyataan kebijakan atau kesempatan yang adil		
32.	Permasalahan rekrutment dan kebijakan terkait		
	G. INFORMASI SEGMENT		
33.	Analisis pesaing – kualitatif		
34.	Analisis pesaing – kuantitatif		
	H. TINJAUAN KEUANGAN		
35.	Rasio Arus Kas		
36.	Biaya Periklanan – kuantitatif		
37.	Efek Inflasi terhadap kegiatan operasi di masa mendatang – kualitatif		
38.	Efek Inflasi terhadap hasil – kualitatif		
	H. TINJAUAN KEUANGAN		
39.	Efek Inflasi terhadap hasil – kuantitatif		
40.	Efek Inflasi terhadap aktiva – kualitatif		
41.	Efek Inflasi terhadap aktiva – kuantitatif		
	I. INFORMASI NILAI TUKAR		
42.	Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap operasi masa mendatang – kualitatif		
43.	Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap operasi masa mendatang – kuantitatif		
44.	Nilai tukar utama didalam akun		
45.	Hutang jangka panjang berdasarkan mata uang tertentu		
46.	Hutang jangka pendek berdasarkan mata uang tertentu		
	J. INFORMASI HARGA SAHAM		
47.	Tren Harga Saham		
48.	Tren Kapitalisasi pasar		
49.	Informasi Listing pasar saham Asing		

LAMPIRAN II

Daftar Nama Perusahaan Perbankan

Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012

No.	Nama Bank	KODE
1	Bank Artha Graha International Tbk	INPC
2	Bank Bukopin Tbk	BBKP
3	Bank Bumi Arta Tbk	BNBA
4	Bank Capital Indonesia Tbk	BACA
5	Bank Central Asia Tbk	BBCA
6	Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA
7	Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN
8	Bank Ekonomi Raharja Tbk	BAEK
9	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	SDRA
10	Bank ICB Bumi Putra Tbk	BABP
11	Bank Intenasional Indonesia Tbk	BNII
12	Bank Jabar Banten Tbk	BJBR
13	Bank Kesawan Tbk	BKSW
14	Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
15	Bank Mayapada International Tbk	MAYA
16	Bank Mega Tbk	MEGA
17	Bank Mutiara Tbk	BCIC
18	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI
19	Bank NISP OCBC Tbk	NISP
20	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP
21	Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN
22	Bank Pembangunan daerah jawa timur (tbk)	BJTM
23	Bank Permata Tbk	BNLI
24	Bank Pundi Indonesia Tbk	BEKS
25	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
26	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	AGRO
27	Bank Sinar Mas Tbk	BSIM
28	Bank Swadesi Tbk	BSWD
29	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN
30	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN
31	Bank Victoria International Tbk	BVIC
32	Bank Windu Kentjana International Tbk	MCOR

LAMPIRAN III

Data Olahan Input SPSS

No.	Nama Bank	KODE	DSCORE	BLOCK	GOVT	INSTL
1	Bank Artha Graha International Tbk	INPC	0.5102	52.62	0	52.62
2	Bank Bukopin Tbk	BBKP	0.5306	59.207	13.036	47.415
3	Bank Bumi Arta Tbk	BNBA	0.4286	90.9	0	90.9
4	Bank Capital Indonesia Tbk	BACA	0.3673	51.27	0	0
5	Bank Central Asia Tbk	BBCA	0.6122	47.15	0	0
6	Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	0.6735	96.92	0	0
7	Bank Danamon Indonesia tbk	BDMN	0.5306	67.37	0	67.37
8	Bank Ekonomi Raharja Tbk	BAEK	0.5102	98.94	0	1
9	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	SDRA	0.551	63.95	0	27.9
10	Bank ICB Bumi Putra Tbk	BABP	0.4693	69.9	0	5.45
11	Bank Intenasional Indonesia Tbk	BNII	0.6735	97.29	0	5.46
12	Bank Jabar Banten tbk	BJBR	0.5306	75.0	75.0	12.23
13	Bank Kesawan Tbk	BKSW	0.5306	69.59	0	20.44
14	Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	0.5714	60.0	60.0	6.73
15	Bank Mayapada International Tbk	MAYA	0.5918	83.15	0	28.51
16	Bank Mega tbk	MEGA	0.551	57.82	0	57.82
17	Bank Mutiara Tbk	BCIC	0.4489	99.996	99.996	0
18	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	0.5714	60.0	60.0	12.46
19	Bank NISP OCBC Tbk	NISP	0.653	85.1	0	2.8
20	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP	0.4082	75.51	0	15
21	Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN	0.5714	84.76	0	45.94
22	Bank Pembangunan daerah jawa timur (tbk)	BJTM	0.551	51.462	80.0	10.97
23	Bank Permata Tbk	BNLI	0.5306	89.12	0	44.56
24	Bank Pundi Indonesia Tbk	BEKS	0.4694	67.85	0	67.65
25	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	0.6531	56.75	56.75	5.92
26	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	AGRO	0.4897	79.78	0	79.78
27	Bank Sinar Mas Tbk	BSIM	0.5102	54.4	0	59.93
28	Bank Swadesi tbk	BSWD	0.3878	76.0	0	17.12
29	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	0.5918	61.35	61.35	11.92
30	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN	0.5714	57.9	0	0
31	Bank Victoria International Tbk	BVIC	0.5918	44.53	0	44.53
32	Bank Windu Kentjana International Tbk	MCOR	0.3877	66.77	0	19.29

Data Olahan Input SPSS

No.	Nama Bank	KODE	FORGN	ASSET	LNTPF	FSIZE	LEV
1	Bank Artha Graha International Tbk	INPC	19.35	3.53	17	18	0.9058
2	Bank Bukopin Tbk	BBKP	0	0.93	18	18	0.9251
3	Bank Bumi Arta Tbk	BNBA	0	3.83	15	15	0.8500
4	Bank Capital Indonesia Tbk	BACA	39.55	2.63	15	16	0.8839
5	Bank Central Asia Tbk	BBCA	47.15	1.45	18	19	0.8800
6	Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	96.92	0.84	19	19	0.8900
7	Bank Danamon Indonesia tbk	BDMN	6.38	1.35	18	19	0.7800
8	Bank Ekonomi Raharja Tbk	BAEK	98.94	0.94	17	17	0.8942
9	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	SDRA	3.91	1.73	16	16	0.9307
10	Bank ICB Bumi Putra Tbk	BABP	75.82	0.55	16	16	0.9040
11	Bank Intenasional Indonesia Tbk	BNII	81.31	0.88	18	19	0.9165
12	Bank Jabar Banten tbk	BJBR	7.28	1.04	18	18	0.8719
13	Bank Kesawan Tbk	BKSW	69.59	2.55	15	15	0.8142
14	Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	32.26	1.1	18	19	0.8800
15	Bank Mayapada International Tbk	MAYA	59.86	3.29	17	17	0.8925
16	Bank Mega tbk	MEGA	0	2.89	18	18	0.9040
17	Bank Mutiara Tbk	BCIC	0	1.28	16	17	0.9184
18	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	24.94	1.38	18	19	0.8700
19	Bank NISP OCBC Tbk	NISP	95.1	1.01	18	18	0.8869
20	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP	75.51	0.44	16	16	0.9195
21	Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN	38.82	1.42	18	19	0.8814
22	Bank Pembangunan daerah jawa timur (tbk)	BJTM	2.16	0.7	17	17	0.8115
23	Bank Permata Tbk	BNLI	44.56	0.57	18	19	0.9052
24	Bank Pundi Indonesia Tbk	BEKS	24.04	4.21	16	16	0.9149
25	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	25.83	0.51	18	19	0.8800
26	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	AGRO	0	0.26	15	15	0.9079
27	Bank Sinar Mas Tbk	BSIM	6.55	3.26	16	17	0.6478
28	Bank Swadesi tbk	BSWD	76.0	0.7	15	16	0.8529
29	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	23.67	1.42	18	19	0.9080
30	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	BTPN	57.9	0.83	17	18	0.8691
31	Bank Victoria International Tbk	BVIC	8.85	1.38	16	16	0.8976
32	Bank Windu Kentjana International Tbk	MCOR	0	1.77	16	16	0.8837

RIWAYAT HIDUP

Diana Aqmarina

H.Mahali RT 01 RW 04 No.20
Pondok Cina Depok 16424
085280917772/ 021-7863621

Personal Data

Name : Diana Aqmarina
Age : 21 Years old
Gender : Female
Phone Number : 085280917772 / 021-7863621
E-mail : Dianaaqmarina@gmail.com
Place/Date of Birth : Depok, 23rd December 1992
Marital Status : Moslem
Height/ Weight : 165cm/50kg
Language Ability : Indonesian and English

Formal Education

University : STIE Indonesia Banking School (2010-2014)
GPA : 3.47
Senior High School : SMA N 38 Jakarta (2007-2010)
Junior High School : SMP N 98 Jakarta (2004-2007)
Elementary School : SDN 3 Pondok cina Depok (1998-2004)

Certified Training

1. Trade Finance (2014)
2. Basic Treasury (2014)
3. Credit Analysis Training (2013)
4. Customer Service Training (2011)
5. Basic Activis Training Program (BATPRO) STIE IBS (2011)
6. Service Excellent Training (2011)

Informal Education

1. English Course, George Mansion University (2010- 2012)
2. LIA English Course, Graduated from level : Intermediate 2 (2007-2009)
3. Salemba Group (2009)
4. BTA 8 Jakarta (2009)
5. MODES Modern english school (2003)
6. Aritmatika ACI (2001)

Organizations

1. Student Senate STIE IBS (2011-2012)

2. Chairman of Student Orientation Week (POM)/OSPEK STIE IBS (2012)
3. Vice Chairman of Workshop IESC STIE IBS (2012)
(Islamic Economic Study Club)
4. Liaison Officer Tennis, Olimpiade IBS (2012)
5. Funding Division of National Banking Forum STIE IBS (2012)
6. Program Division of Best Student STIE IBS (2012)
7. Consumption Division of Rhythm Night STIE IBS (2012)
8. Publication Division of National Banking Forum (2011)
9. UKM Tari Indonesia Banking School (2010-2013)

Job Experience

1. Internship Bank Indonesia Tasikmalaya (2012)
2. Internship BRI Unit junrejo Malang (2011)
3. Customer Relationship Officer Indonesia Banking School (2010-2013)

Achievement

1. Finalis Best Student STIE IBS (2011)
2. Supercup IV Indonesia Banking School (2011)
(3rd Winner with Saman IBS Team)

